

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2020 telah terselesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Tahunan ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pada tahun 2020, Laporan Tahunan dibuat untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Badan Pengawasan diharapkan dapat memberikan perubahan dalam mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan sarana yang berkaitan dengan pelaksana tugas pengawasan serta kemudahan dalam mengakses Sistem Informasi Pengawasan dalam penyampaian pengaduan.

Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan Tahun 2020 telah kami upayakan sebaik mungkin, untuk dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Pengawasan serta memberikan gambaran dalam upaya nyata melakukan pembenahan terhadap tertib pelaksanaan tugas yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh Aparat Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas, khususnya berkaitan dengan pelayanan penanganan pengaduan dan terwujudnya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

Jakarta, Februari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



DW. ARSO BUDI SANTIARTO

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Umum.....	1
B. Visi dan Misi.....	1
C. Rencana Strategis.....	2
BAB II.....	3
STRUKTUR ORGANISASI.....	3
A. Standard Operational Procedures (SOP).....	8
B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	9
BAB III.....	10
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.....	10
A. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	10
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	42
C. Pengelolaan Keuangan.....	50
D. Regulasi Tahun.....	55
BAB IV.....	59
PENGAWASAN.....	59
A. Program Pembaharuan.....	59
1. Pengembangan Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI.....	59
2. Kegiatan Kerjasama Corruption Risk Assessment (CRA) dengan KPK dan AIPJ.....	60
B. Pengelolaan Sistem Pengawasan.....	62
1. Penanganan Pengaduan.....	62
2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim.....	64
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	65
4. Penguatan Sistem Pengawasan.....	66
5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler.....	67
a. Pemeriksaan Reguler.....	67
b. Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP.....	67

6. Satuan Tugas Khusus Pengawasan.....	69
7. Pemeriksaan Audit Kinerja.....	70
8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	72
9. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.....	73
10. Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP).....	83
11. Inspeksi Mendadak (SIDAK).....	84
12. Penyamaran (Mystery Shopping).....	84
C. Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	84
D. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	86
E. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI).....	87
F. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.....	87
G. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).....	88
BAB V.....	89
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Pengawasan Intern merupakan kegiatan penjamin dan konsultasi yang independen dan objektif untuk mendukung kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pencapaian tujuannya melalui pendekatan yang sistematis, dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas, manajemen resiko dan proses tata kelola Mahkamah Agung RI, untuk mewujudkan pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa.

Penanganan Pengaduan merupakan salah satu kinerja utama pada Badan Pengawasan sebagaimana yang terdapat pada Perma No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Salah satu penunjang keberhasilan penanganan pengaduan tersebut adalah adanya dukungan Teknologi Informasi yang terintegrasi dari pusat sampai pada satker di daerah yang dikenal dengan Aplikasi Siwas MA RI.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik diantaranya dengan penyempurnaan Aplikasi Siwas yang saat ini versi 3.

Selain Aplikasi Siwas MA RI, Badan Pengawasan juga berupaya mengembangkan Aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan yaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. Visi dan Misi

Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dan dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut Badan Pengawasan telah menetapkan Visi yaitu ***”Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”***.

Yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;

3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

C. Rencana Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu		
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan		
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu		
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti		
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti		
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu		
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja		
	Pelaksanaan Zona Integritas		
	Probity Audit PBJ		
	Consulting Probity Audit		
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana		
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan		

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- 4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

b. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Sumatera yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

c. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Jawa dan Bali yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

d. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

e. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

3. Eselon III

Organisasi Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Eselon II), yang didukung dengan jabatan struktural dibawahnya yang meliputi :

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan Laporan Keuangan dan verifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
- 2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- 3) Sub Bagian Akuntansi.

b. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;

- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Mutasi;
- 3) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi;
- 3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- 2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.

A. Standard Operational Procedures (SOP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2020 telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah tidak sesuai lagi dan penambahan SOP berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu :

1. Evaluasi atas Pemenuhan Kebutuhan SOP Organisasi

SOP yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan organisasi dalam penataan hubungan kerja, sehingga diperlukan beberapa penambahan SOP baru guna memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada pada Badan Pengawasan yaitu:

a. SOP KEPEGAWAIAN

SOP Penanganan Penilaian Jabatan Fungsional Auditor Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

b. SOP UMUM

SOP Penggunaan BMN.

c. SOP KEUANGAN

- 1) Standard Operating Procedures (SOP) Usulan Revisi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 2) SOP Monitoring Evaluasi Kinerja (Monev Bappenas) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 3) SOP Monitoring Evaluasi Anggaran (Monev Smart DJA) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

d. SOP ORTALA

- 1) Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKJIP Badan Pengawasan (revisi II)
- 2) Standar Operasional Prosedur LKJIP Mahkamah Agung (revisi II)
- 3) Standar Operasional Prosedur Tayangan Hukuman Disiplin (revisi II)
- 4) Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laptah Bawas (revisi II)
- 5) Standar Operasional Prosedur Layanan Perpustakaan (revisi II)
- 6) SOP Peliputan Kegiatan (revisi II)
- 7) SOP Peminjaman Buku Perpustakaan (revisi II)
- 8) SOP Penanganan LHP Kasus (revisi II)
- 9) SOP Pengelolaan Arsip LHP (revisi II)
- 10) SOP Pengembalian Buku Perpustakaan (revisi II)
- 11) SOP Peminjaman LHP (revisi II)
- 12) SOP Penanganan LHP Reguler, Monitoring, Audit Kinerja & Reviu (revisi II)
- 13) SOP Upload Data pada Website Badan Pengawasan (revisi II)
- 14) SOP Penyiapan Bahan Pelayanan Informasi tentang Hukuman Disiplin (revisi II)

e. SOP IRWIL

- 1) SOP Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

f. SOP AUDITOR

- 1) SOP Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 2) SOP Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas terhadap Satker yang telah memperoleh WBK dan WBBM.
- 3) SOP Penilaian Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

2. Evaluasi atas Format dan Kelengkapan SOP

Dokumen SOP yang dibuat dan sesuai dengan format dan kelengkapan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan SOP tetapi diperlukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu :

SOP Sekretariat Badan Pengawasan dan Ortala

- SOP Klarifikasi dan Konfirmasi atas Pengaduan
- SOP Meja Pengaduan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
- SOP Delegasi penanganan pengaduan ke Pengadilan Tingkat Banding
- SOP Pemeriksa oleh Tim Pemeriksa
- SOP Rehabilitasi Nama Baik
- SOP Pengaduan Inisiatif sendiri dari Tingkat Banding
- SOP Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin
- SOP Pemeriksa oleh Tim Pemeriksa

B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.

Pada tahun 2020 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun dan penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, kenaikan pangkat Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan Honorer yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 4 orang (Sekretaris dan 3 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 3 orang
- Pejabat Eselon IV : 13 orang

2. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 46 orang
- Hakim Yustisial : 25 orang
- Auditor : 29 orang
- Auditor Kepegawaian : 10 orang
- Pustakawan : 2 orang
- Pranata Komputer : 2 orang
- Arsiparis : 1 orang

3. Staf : 18 orang

4. Honorer : 16 orang

Pada tahun 2020, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pelaksana dan Honorer, kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

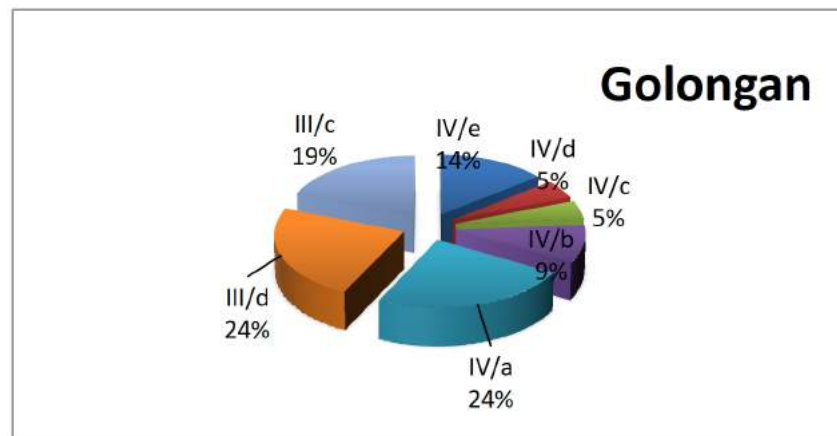
1.1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Adapun untuk pengelompokan Pejabat Struktural ini

berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 dan tabel 1.4.

Tabel 1.1.1 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	3	14 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	5 %
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	5 %
4.	Pembina Tk I (IV/b)	2	9 %
5.	Pembina (IV/a)	5	24 %
6.	Penata Tk I (III/d)	5	24 %
7.	Penata (III/c)	4	19 %



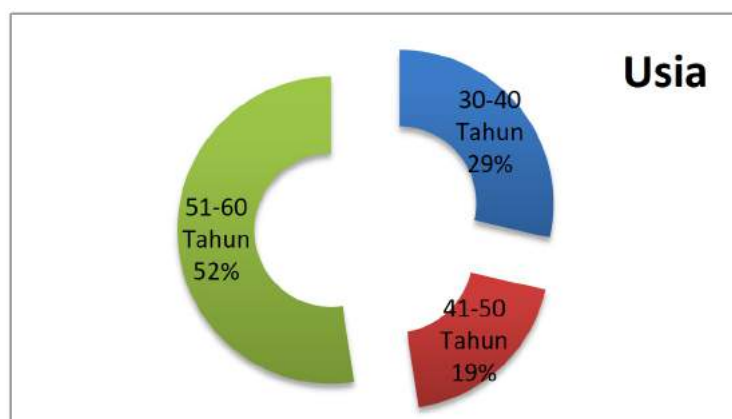
Tabel 1.1.2 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	2	10 %
2.	S2	15	71 %
3.	S1	4	19 %



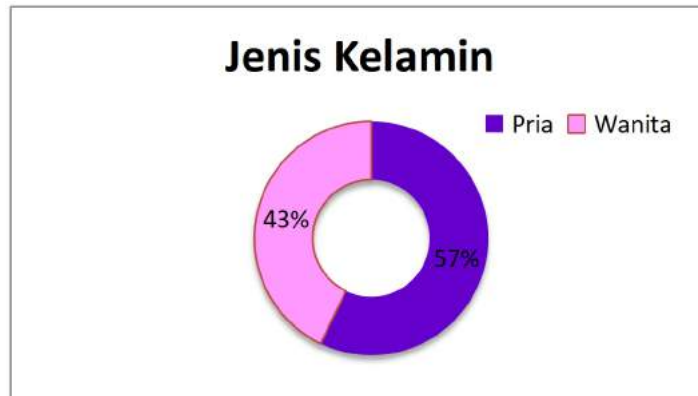
Tabel 1.1.3 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	6	29 %
2.	41– 50	4	19 %
3.	51 – 60	11	52 %



Tabel 1.1.4 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	12	57 %
2.	Wanita	9	43 %

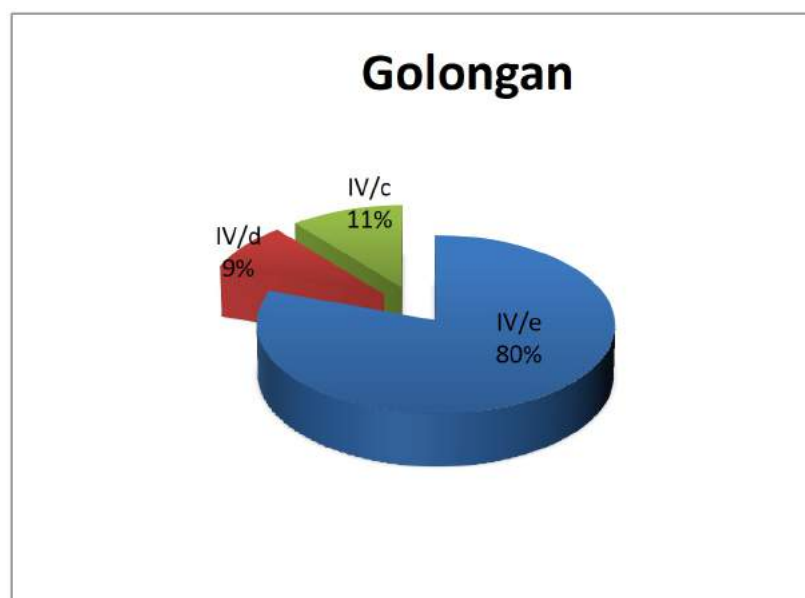


1.2. Pejabat Fungsional

Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 115 (Seratus lima belas) orang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pustakawan, Pranata Komputer dan Arsiparis. Adapun pangkat/golongan, pendidikan, usia dan jenis kelamin tenaga teknis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	37	80 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	4	9%
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	5	11 %



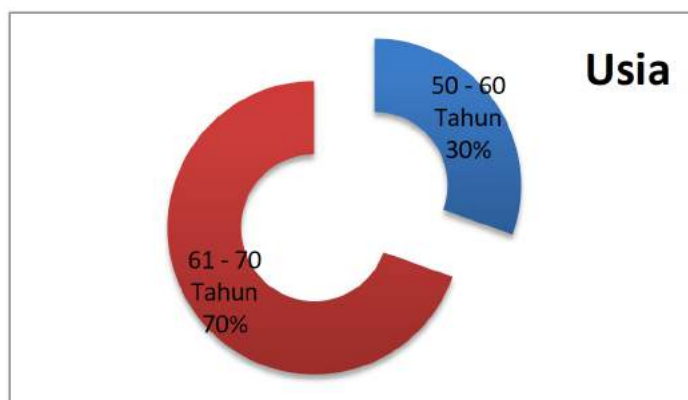
Tabel 1.2.2 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	4	9 %
2.	S2	30	65 %
3.	S1	12	26%



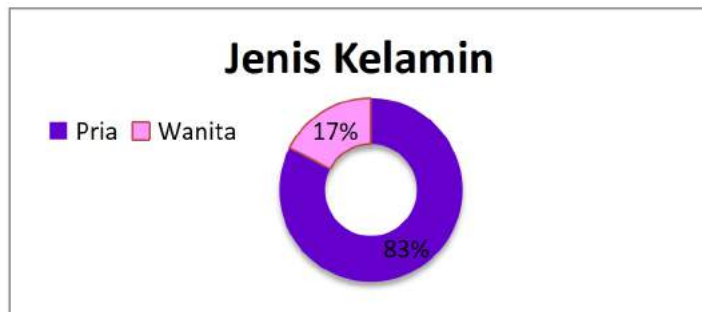
Tabel 1.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 60	14	30%
2.	61 – 70	32	70%



Tabel 1.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

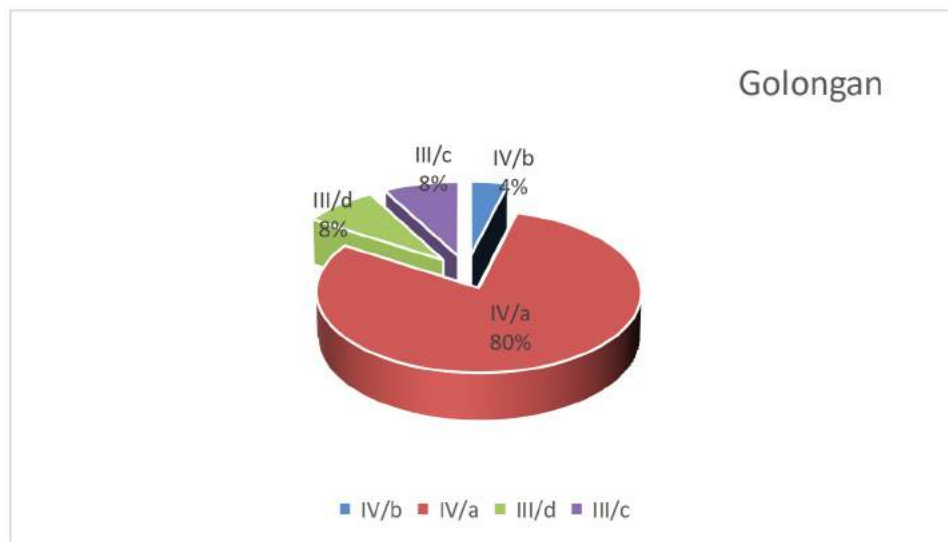
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	38	83 %
2.	Wanita	8	17 %



1.3. Hakim Yustisial

Tabel 1.3.1 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	4 %
2.	Pembina (IV/a)	20	80 %
3.	Penata Tk. I (III/d)	2	8%
4.	Penata (III/c)	2	8%



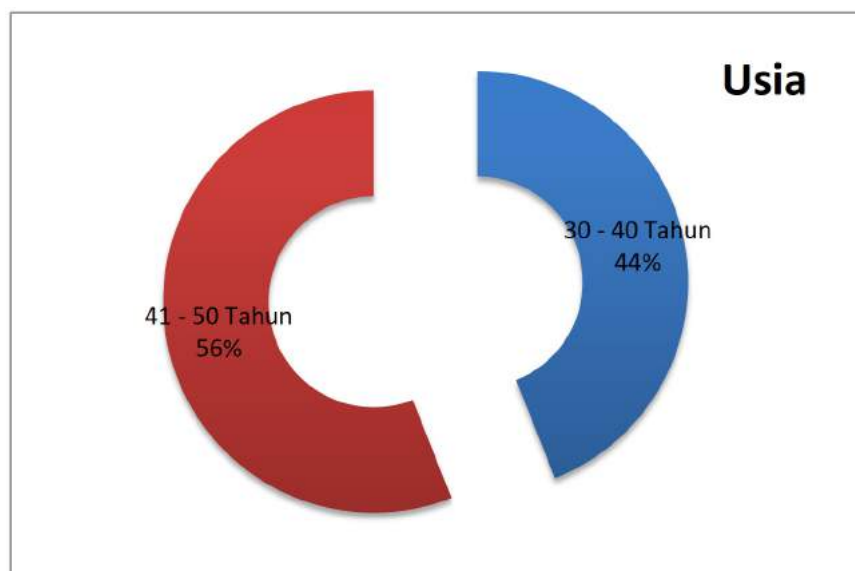
Tabel 1.3.2 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	4	16 %
2.	S2	15	60 %
3.	S1	6	24 %



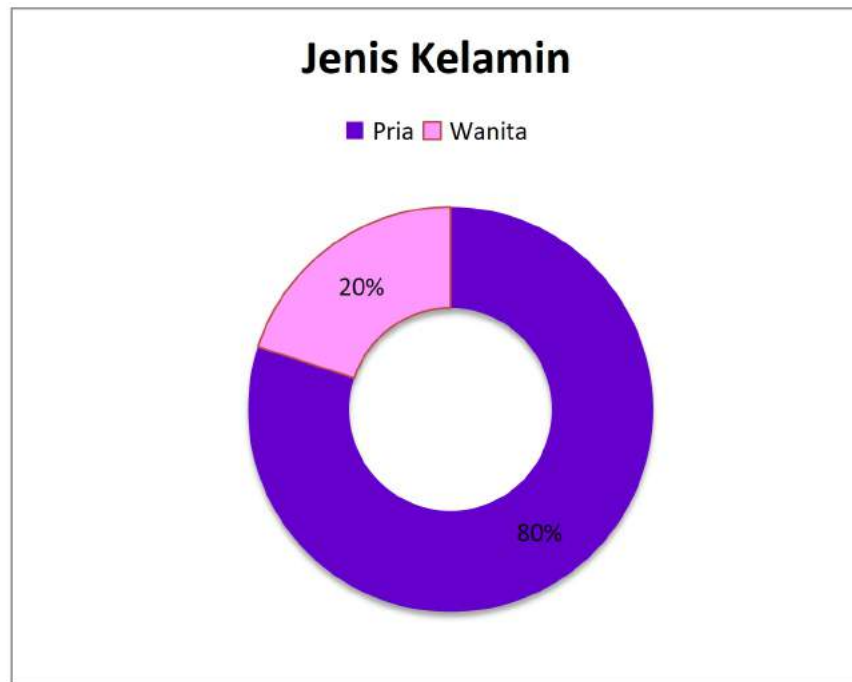
Tabel 1.3.3 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia.

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	11	44%
2.	41–50	14	56%



Tabel 1.3.4 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

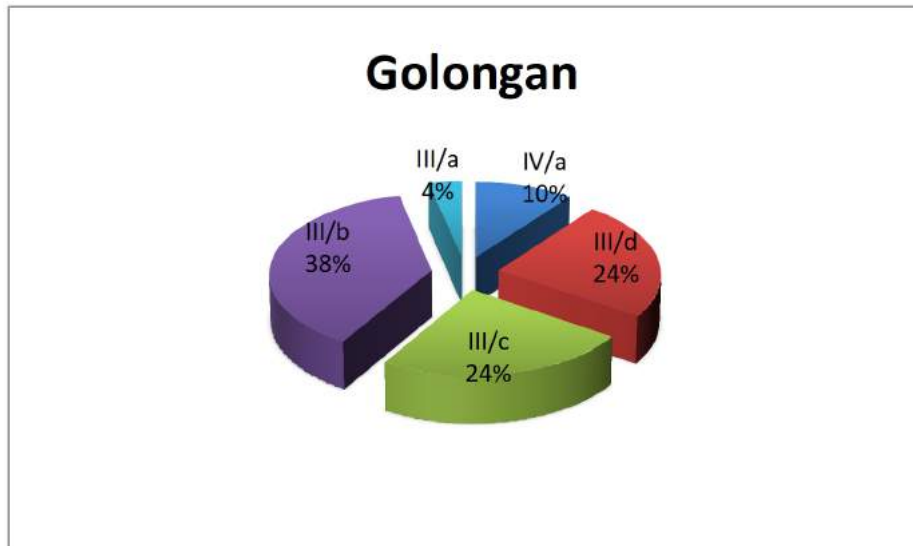
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	20	80%
2.	Wanita	5	20%



1.4. Auditor

Tabel 1.4.1 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/a)	3	10 %
2.	Penata Tk. I (III/d)	7	24 %
3.	Penata (III/c)	7	24 %
4.	Penata Muda Tk.I (III/b)	11	38 %
5.	Penata Muda (III/a)	1	4 %



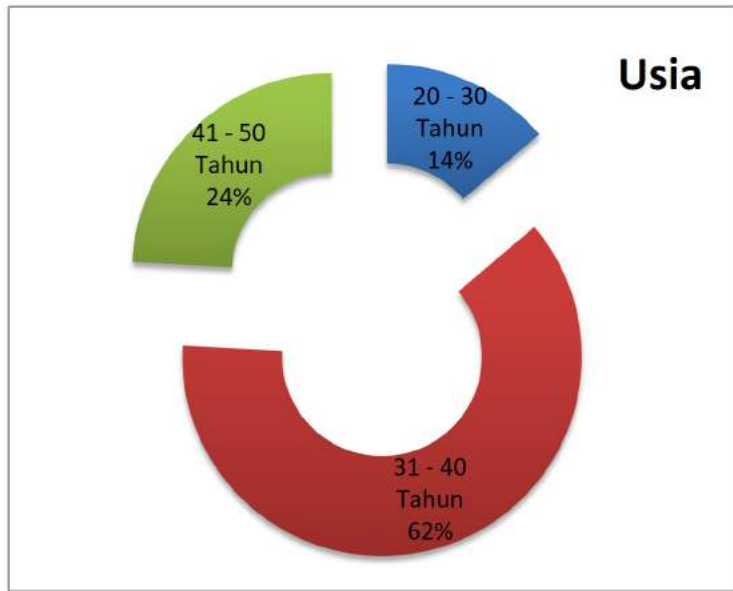
Tabel 1.4.2 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	15	52%
2.	S1	14	48%



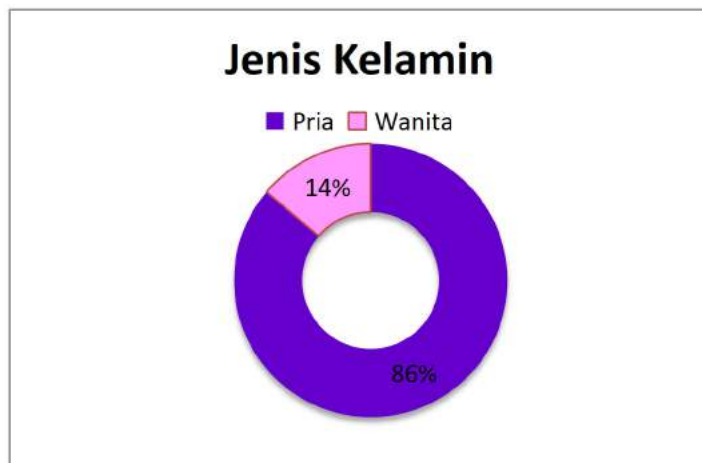
Tabel 1.4.3 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20 –30	4	14 %
2.	31–40	18	62 %
3.	41–50	7	24 %



Tabel 1.4.4 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

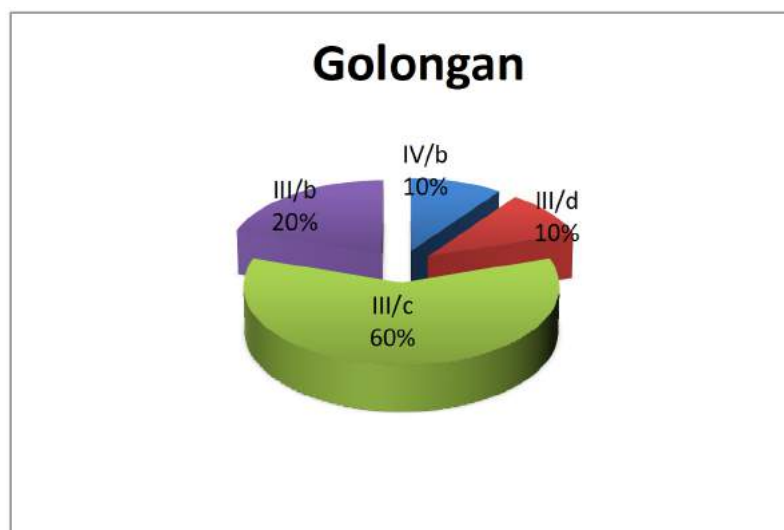
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	25	86%
2.	Wanita	4	14%



1.5. Auditor Kepegawaian

Tabel 1.5.1 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/b)	1	10%
2.	Penata Tk. I (III/d)	1	10 %
3.	Penata (III/c)	6	60%
4.	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	20%



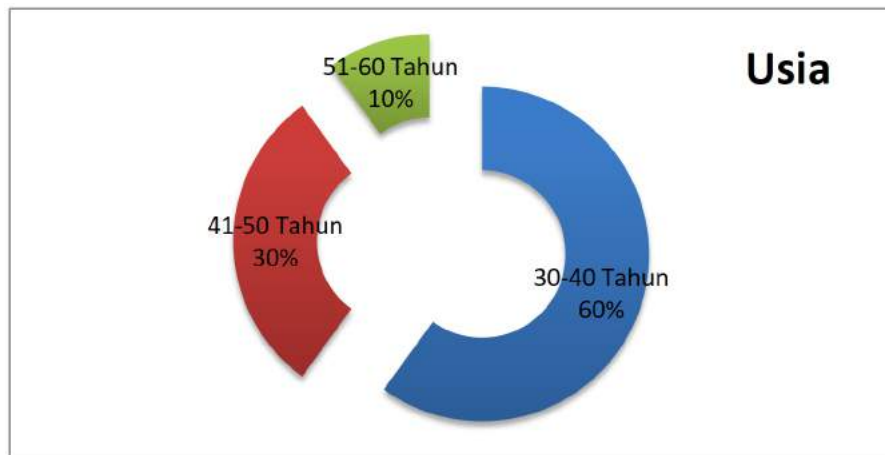
Tabel 1.5.2 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	2	20 %
2.	S1	8	80 %



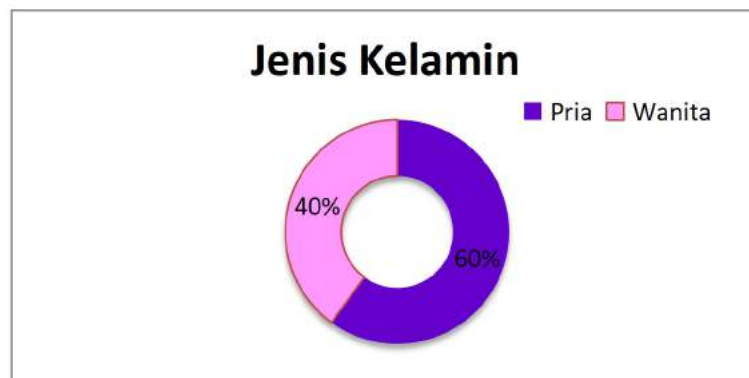
Tabel 1.5.3 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	6	60 %
2.	41 –50	3	30 %
3.	51 – 60	1	10 %



Tabel 1.5.4 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

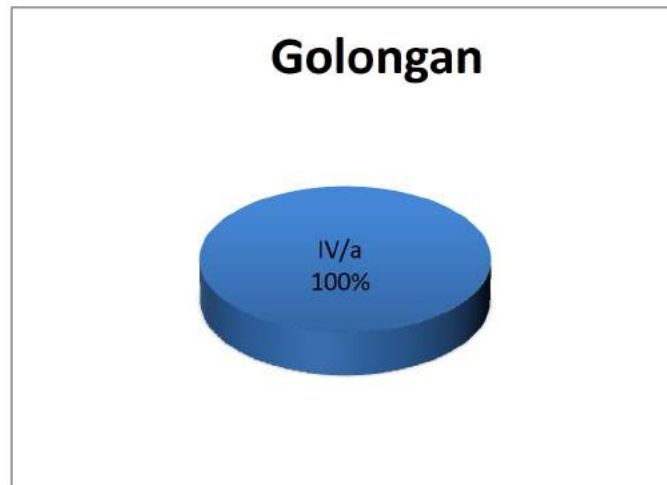
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	6	60 %
2.	Wanita	4	40 %



1.6. Pustakawan

Tabel 1.6.1 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/a)	2	100 %



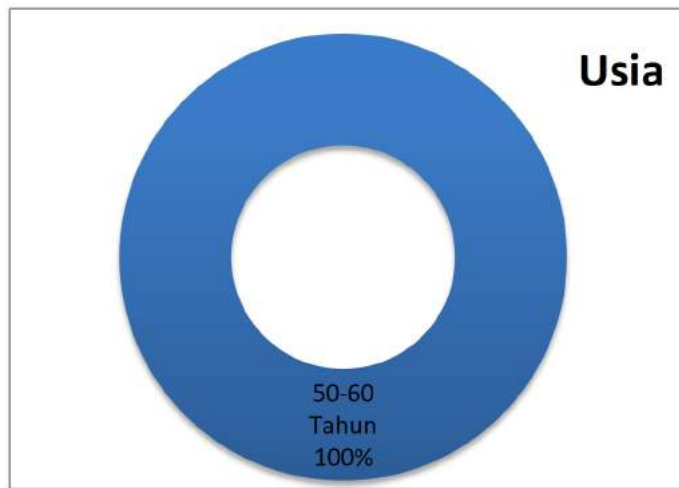
Tabel 1.6.2 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	2	100 %



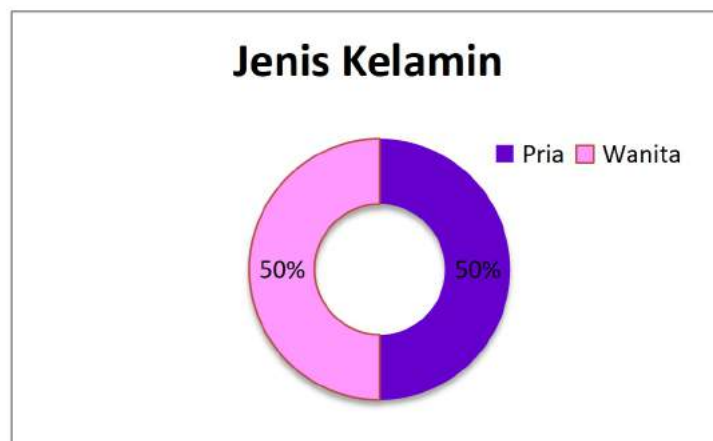
Tabel 1.6.3 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 60	2	100 %



Tabel 1.6.4 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

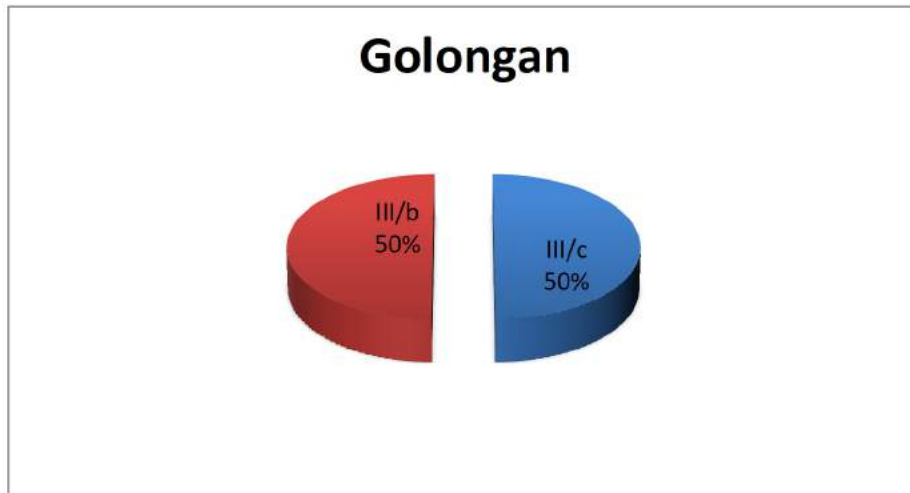
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	1	50 %
2.	Wanita	1	50 %



1.7. Pranata Komputer

Tabel 1.7.1 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata (III/c)	1	50 %
2.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	50 %



Tabel 1.7.2 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-1	2	100 %



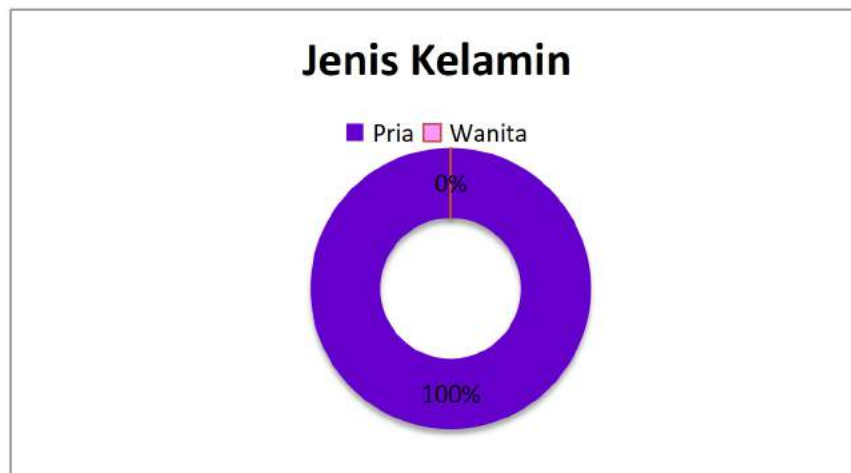
Tabel 1.7.3 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	1	50 %
2.	41 – 50	1	50 %



Tabel 1.7.4 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	2	100%
2.	Wanita	0	0 %



1.8. Analisis Arsiparis

Tabel 1.9.1 Data Arsiparis pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	100 %

Tabel 1.9.2 Data Arsiparis pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	1	100 %

Tabel 1.9.3 Data Arsiparis Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	1	100 %

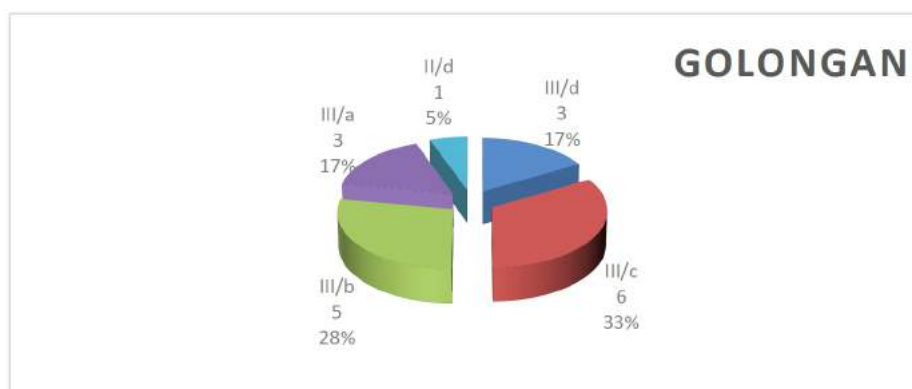
Tabel 1.9.4 Data Arsiparis pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	1	100%
2.	Wanita	0	0 %

1.9. Staf

Tabel 1.10.1 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Tk. I (III/d)	3	17%
2.	Penata (III/c)	6	33%
3.	Penata Muda Tk.I (III/b)	5	28%
4.	Penata Muda (III/a)	3	17%
5.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	5%



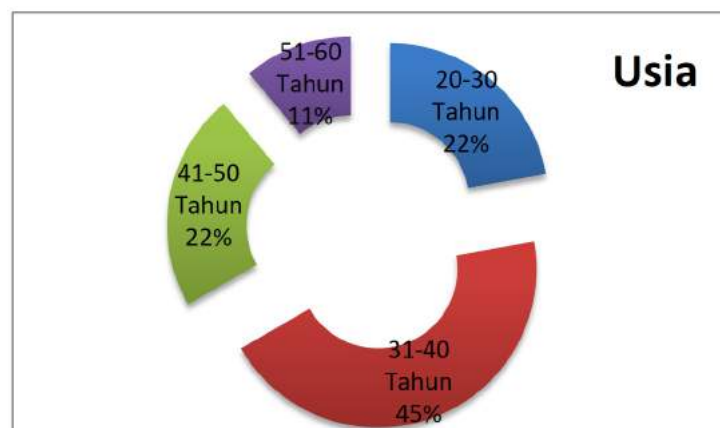
Tabel 1.10.2 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	5	28%
2.	S1	9	50%
3.	D3	1	5 %
4.	SLTA	3	17%



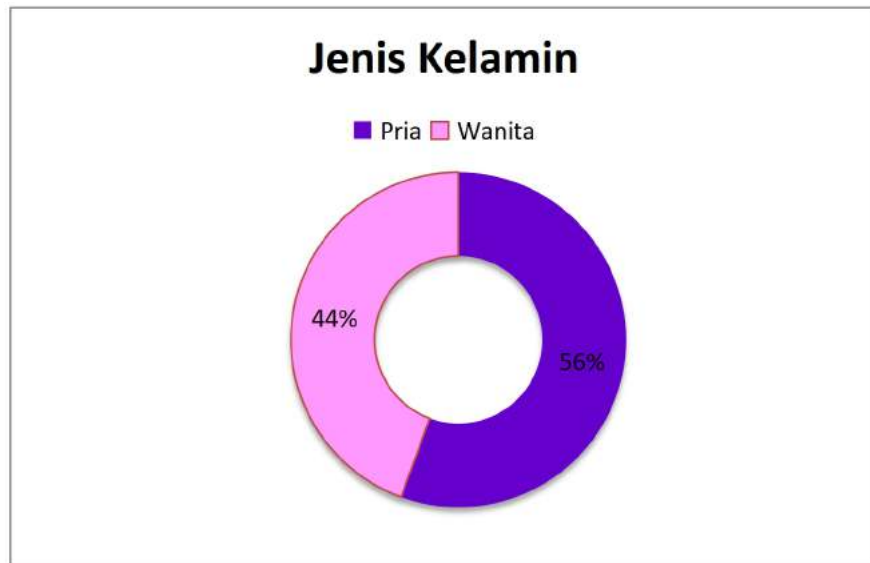
Tabel 1.10.3 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20–30	4	22 %
2.	31 –40	8	45%
3.	41 – 50	4	22%
4.	51 – 60	2	11%



Tabel 1.10.4 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

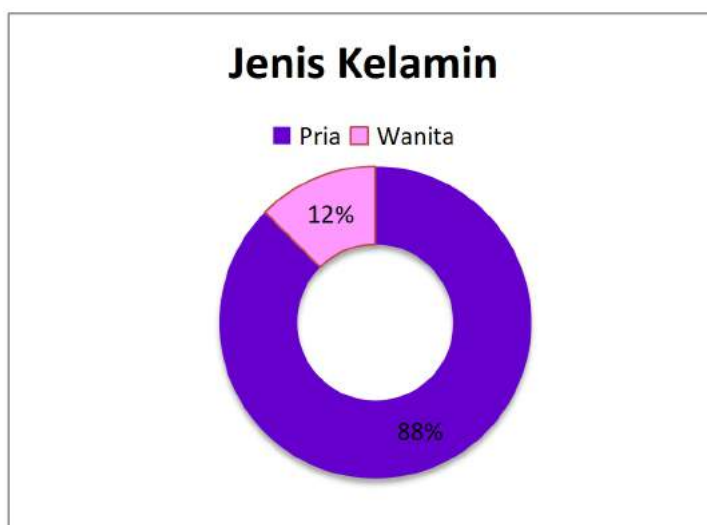
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	10	56 %
2.	Wanita	8	44 %



1.1. Honorer

Tabel 1.11.1 Data Honorer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	14	87 %
2	Wanita	2	13 %



2. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Drs. H.Samsul Bahri, M.Hum	Hakim Utama/Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	Hakim Utama/Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI
2.	Dr. Made Suweda, SH., MH	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diperkerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
3.	H. Abd. Rosyad, SH	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Palu	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Paludiperkerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
4.	H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum	Hakim Utama Muda/Ketua Pengadilan Agama Cibinong	Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI
	Kolonel Sus Reki Irene Lumme, SH., MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta
5.	Tuty Kiptiani, SH., MH	Angpokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya	Angpokkimmilti Gol IV Dilmilti II Jakarta BP Badan Pengawasan MARI
6.	Sri Anggarwati, SH.,M.Hum	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jakarta	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
7.	Kolonel Sus. Syarifah Nursiana, SH	Kaldilmil I-07 Balikpapan	Angpokkimmilti Gol IV Dilmilti II Jakarta BP Badan Pengawasan MARI
8.	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, SH., MH	Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan MARI	Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu
9.	Nugroho Setiadji, SH	Kepala Badan pada Badan Pengawasan MARI	Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
10.	H. Dwiarso Budi Santiarso, SH.M.Hum	Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI	Kepala Badan pada Badan Pengawasan MARI

11.	H. Achmad Zainullah, SH., MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan MARI
12.	Dr.H. Mustamar, SH., MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah III pada Badan Pengawasan MARI
13.	Susilowati, SH., MH	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diperkerjakan untuk tugas peradilan(Yustisial) pada Mahkamah Agung RI	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diperkerjakan untuk tugas peradilan(Yustisial) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN SEKRETARIS PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Hj. Yefni Delfitri, SH., MH	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Padang

4. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN HAKIM YUSTISIAL PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Dr. H. Ahmad Syahrus Sikti, SHI.MH	Hakim Pratama Utama/Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan	Hakim Pratama Utama/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
2.	Wahyu Sudrajat, SH., MH.,Li	Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Magelang	Hakim Pratama Utama/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
3.	Ade Suherman, SH., MH	Hakim Madya Pratama/ Ketua Pengadilan Kalianda	Hakim Madya Pratama/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
4.	Drs. Eko Nurahmat, MH	Hakim Utama Muda/ Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara /Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon
5.	Gayuh Rahantyo, SH	Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan

		Negara Denpasar	MARI
6.	Primafika Syofyan, SH	Hakim Pratama Madya Pengadilan Militer III – 17 Manado	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
7.	Hadi Prayitno, SH., MM	Hakim Pratama Madya Pengadilan Militer III – 18 Ambon	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
8.	Averroes, SH	Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI

5. PROMOSI FUNGSIONAL UMUM MENJADI PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Dwi Wulan Indriani, S.Psi	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Badan Pengawasan MARI
2.	Dewi Nurqolbi Triastuti, S.Psi., M.H	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan pada Badan Pengawasan MARI

6. PROMOSI DAN MUTASI FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Rohili, SH	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong
2.	Supriyanto	Pengelola Akuntansi pada Badan Pengawasan MARI	Analisis Hukum pada Pengadilan Negeri Temanggung

7. PROMOSI PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM MENJADI FUNGSIONAL TERTENTU PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	R. Lucky Permana, SH., MH	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Pustakawan Madya pada Badan Pengawasan MARI
2.	Devi Pradifita Army, SH	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
3.	Rizki Rantaperkasa, SH	Fungsional Umum pada Pengadilan Tinggi Banten	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI
4.	Iva Fairouz Afrinadya,	Kepala Sub Bagian Umum	Auditor Madyapada Badan

	SH., MH	Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Pengawasan MARI
5.	Jhon Richo, S.Psi	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Mudapada Badan Pengawasan MARI
6.	Virna Prasamia Nugraha, SE	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Mudapada Badan Pengawasan MARI
7.	Amarilldo Rizkia, S.Psi	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Mudapada Badan Pengawasan MARI
8.	Arief Purwoko, S.Kom	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
9.	Riswan Marhaen Renuat, S.Kom	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
10.	Tagor Bagus Suprobo, SH	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
11.	Ekasari Kurniawati, SE	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
12.	Rizky Setyo Pambudi, S.Kom	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI

8. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Imam Purnomo, SE., Ak	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI
2.	Yusuf, SE., Ak	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI
3.	Marwendi Putra, ST., MM	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI

9. MUTASI KEPANGKATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN

PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2020 SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	PANGKA T/GOL.	T.M.T	PANGKA / GOL.	T.M.T
1.	Aviantara, SH., M.Hum	IV/d	01-04-2016	IV/e	01-04-2020
2.	Noor Edy Yono, SH., MH	IV/d	01-04-2016	IV/e	01-04-2020
3.	Jupriyadi, SH., M.Hum	IV/d	01-04-2016	IV/e	01-04-2020
4.	Sutiyono, SH., M.H	IV/d	01-04-2016	IV/e	01-04-2020
5.	Aminal Umam, SH., MH	IV/d	01-10-2016	IV/e	01-10-2020

10. MUTASI KEPANGKATAN HAKIM YUSTISIAL PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2020 SEBAGAI BERIKUT :

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangkat/ Gol	T.M.T
1.	Radityo Baskoro, SH., M.Kn	IV/a	01-04-2016	IV/b	01-04-2020
2.	Abdul Affandi, SH	III/d	01-04-2016	IV/a	01-04-2020
3.	H. Sunoto, SH., M.Kn	III/d	01-04-2016	IV/a	01-04-2020
4.	Horasman Boris Ivan, SH	III/d	01-04-2016	IV/a	01-04-2020
5.	Dr. Supandriyo, SH., M.H	III/d	01-04-2016	IV/a	01-04-2020
6.	Wahyu Sudrajat, SH., MH.,Li	III/d	01-04-2016	IV/a	01-04-2020
7.	Mayor CHK. Primafika Syofyan, SH	III/d	01-10-2016	IV/a	01-10-2020

11. MUTASI KEPANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2020 SEBAGAI BERIKUT :

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangk at/ Gol	T.M.T
1.	Muhammad Anis, SE., Ak	III/d	01 – 04 – 2018	IV/a	01 – 04 – 2020
2.	Hendra Basry, SE., M.Ak	III/c	01 – 04 – 2018	III/d	01 – 04 – 2020
3.	Mulia Karyadi, ST., MM	III/c	01 – 04 – 2016	III/d	01 – 04 – 2020
4.	Narti Sri Sugiarti, SE	III/b	01 – 04 – 2016	III/c	01 – 04 – 2020
5.	Letda. Chk. Fahri Soleh	II/d	01 – 04 – 2017	III/a	01 – 07 – 2020
6.	Drs. H. Andi Kurniawan, MM	IV/c	01 – 10 – 2016	IV/d	01 – 10 – 2020
7.	Imam Purnomo, se., Ak., C.A	III/d	01 – 04 – 2018	IV/a	01 – 10 – 2020
8.	Muhammad Adzkiya, SE, M.Acc, C.A	III/c	01 – 10 – 2016	III/d	01 – 10 – 2020
9.	Mochtar Luthfi, SH, MH	III/c	01 – 10 – 2016	III/d	01 – 10 – 2020
10.	Jufri Hardi, ST, MH	III/c	01 – 10 – 2018	III/d	01 – 10 – 2020
11.	Musa La Haji, S.H.I	III/c	01 – 04 – 2015	III/d	01 – 10 – 2020
12.	Edi Gustiawan, SH., MM	III/c	01 – 04 – 2018	III/d	01 – 10 – 2020
13.	Yanalia Nurmawati, SE, SH, M.Ak	III/c	01 – 10 – 2016	III/d	01 – 10 – 2020

12. DATA HAKIM TINGGI PENGAWASAN YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2020, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	H. Achmad Zainullah, SH., MH	28 Tahun	'01-03-2020
2.	Jupriyadi, SH., M.Hum	32 Tahun	'01-03-2020
3.	Sutiyono, SH., M.H	32 Tahun	'01-03-2020
4.	H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum	28 Tahun	'01-03-2020
5.	Dr. H. Mustamar, SH., MH	30 Tahun	'01-04-2020
6.	Suradi, SH., S.Sos, MH	28 Tahun	'01-12-2020
7.	Sugiyanto, SH	28 Tahun	'01-12-2020

13. DATA HAKIM YUSTISIAL YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2020, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Radityo Baskoro, SH., M.Kn	20 Tahun	'01-03-2020
2.	Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH	14 Tahun	'01-04-2020
3.	Widyatinsri Kuncoro Yakti, SH., MH	18 Tahun	'01-12-2020
4.	Dr . H. Ahmad Syafiq, S.Ag., MH	18 Tahun	'01-12-2020
5.	Anisah Shofiawati, SH	18 Tahun	'01-12-2020
6.	Endang Lestari, SH., M.Kn	18 Tahun	'01-12-2020
7.	Mario Parakas, SH.,MH	18 Tahun	'01-12-2020
8.	Mohamad Syauqie, SH., MH	18 Tahun	'01-12-2020
9.	Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI	18 Tahun	'01-12-2020
10.	Harika Nova Yeri, SH., MH	18 Tahun	'01-12-2020
11.	Bayuardi, SH., MH	18 Tahun	'01-12-2020
12.	Rosana Kusuma Hidayah, SH., M.SI	20 Tahun	'01-12-2020

13.	Ade Suherman, SH., MH	18 Tahun	'01-12-2020
-----	-----------------------	----------	-------------

14. DATA PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2020, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Nuzliana Abda, SH., MH	26 tahun	'01-03-2020
2.	Mulyanto, SH., MH	16 tahun	'01-03-2020
3.	Sri Widayanti, SH., MM	16 tahun	'01-03-2020
4.	Dra. Siti Zainab	28 tahun	'01-03-2020
5.	Sri Misgianti, SE	22 tahun	'01-03-2020
6.	Desiyanto	26 tahun	'01-03-2020
7.	Winarsih	26 tahun	'01-03-2020
8.	Eko Purwanto, ST	14 tahun	'01-04-2020
9.	Yusuf, SE., Ak	14 tahun	'01-04-2020
10.	Muhammad Anis, SE., Ak	14 tahun	'01-04-2020
11.	Ferri Taufik Ferdiansyah, SE., Ak	14 tahun	'01-04-2020
12.	Imam Purnomo, SE., Ak	14 tahun	'01-04-2020
13.	Marwendi Putra, ST., MM	14 tahun	'01-04-2020
14.	Betty Kurnianingtyas, S.Kom	14 tahun	'01-04-2020
15.	Supriyanto	11 tahun	'01-04-2020
16.	Mawardi	11 tahun	'01-04-2020
17.	Ekasari Kurniawati, SE	12 tahun	'01-04-2020
18.	Abu Samah, SE., MM., Ak	16 tahun	'01-04-2020
19.	Mulia Karyadi, ST., MM	12 tahun	'01-04-2020
20.	Mochtar Lufhi, SH	12 tahun	'01-05-2020
21.	Bram Budi Nurcahyo, SE., Ak.,	10 tahun	'01-05-2020

	MH.		
22.	Nurdiansyah, SH	10 tahun	'01-10-2020
23.	Sodikin, SE., SH., MH	16 tahun	'01-12-2020
24.	Edi Gustiawan, SH	12 tahun	'01-12-2020

15. HAKIM TINGGI PENGAWAS, PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG MEMASUKI PURNABAKTI/ PENSIUN PADA TAHUN 2020 SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1.	Drs. H. Ruslan Abd. Gani, MH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	
2.	Drs. H. Husen Riady, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	
3.	Subiyono, SH., MH	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Badan Pengawasan MARI	01-06-2020
4.	Partijem	Analisis Kepegawaian Penyelia pada Badan Pengawasan MARI	01-06-2020

16. HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG TUTUP USIA PADA TAHUN 2020 DAN MASIH AKTIF DALAM MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN YAITU :

NO	NAMA	JABATAN	WAFAT
1.	Rasyikin Azis, SH., MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	02-02-2020
2.	Ahmad Athoyari, SH., MH	Kepala Bagian Umum pada Badan Pengawasan MARI	07-09-2020

17. PENGHARGAAN SATYA LANCANA 30 TAHUN, 20 TAHUN DAN 10 TAHUN YANG DIPEROLEH OLEH HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL, PEJABAT STRUKTURAL, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	JABATAN	SATYA LANCANA
1.	Kusnoto, SH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
2.	Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
3.	Sri Kamala Dewi, S.H., M.H	Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
4.	Winarsih	Pengadministrasi Perpustakaan pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
5.	Sri Misgianti, S.E., M.H	Pustakawan pada Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
6.	Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
7.	Horasman Boris Ivan, S.H	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
8.	Dr. Supandriyo, S.H., M.H	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
9.	Wahyu Sudrajat, SH., M.H.Li	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
10.	Rama Rahim, S.E., M.M., MBA	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
11.	Jufri Hardi, S.T.,M.H	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
12.	Apriyadi Romian Kardono, S.E., Akt.,C.A., M.Ak	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
13.	Bram Budi Nurcahyo, SE., Ak., MH	Arsiparis pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
14.	Muhammad Ulul Ilmi	Penata Keuangan pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
15.	Hj. Yefni Delfitri, S.H., M.H	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	16 Tahun

16.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	16 Tahun
17.	Sodikin, S.E., S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	16 Tahun
18.	Mulyanto, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	16 Tahun
19.	Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI	16 Tahun
20.	IGLN Sidemen Putra, S.E	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
21.	Eko Purwanto, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
22.	Dewi Nurqolbi Triastuti, S.Psi., M.H	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
23.	Muhammad Anis, S.E., Ak., C.A., M.Ak	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
24.	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., C.A., M.Ak	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
25.	Imam Purnomo, S.E., Ak., C.A	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
26.	Marwendi Putra, S.T., M.M.	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
27.	Yusuf, S.E., Ak., C.A., M.A.	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
28.	Virna Prasemia Nugraha, S.E	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
29.	Betty Kurnianingtyas, S.Kom	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
30.	Edi Gustiawan, S.H., M.M.	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun

31.	Musa La Haji, S.H.I.	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
32.	Recky Roger Koraag, S.H.	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
33.	Abu Samah, S.E., M.M., Ak.	Analisis Pengembangan kompetensi pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
34.	Mulia Karyadi, S.T., M.M.	Analisis Jabatan pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
35.	Yanalia Nurmawati, S.E., S.H., M.Ak	Analisis Aset Negara pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
36.	Mawardani, S.H.	Analisis Tatalaksana pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun
37.	Imawan Suprpto, S.E.	Penyusun Rencana dan Kegiatan pada Badan Pengawasan MARI	8 Tahun

18. SDM PEJABAT/HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN, PUSTAKAWAN, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER, ARSIPARIS, PEJABAT STRUKTURAL SERTA FUNGSIONAL UMUM YANG MENGIKUTI DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASIAN LAIN SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA	TUJUAN
1.	Pendidikan Diktupa TNI AD	1 Orang	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Kompetensi SDM
2.	Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahkamah Agung RI	11 orang	Badan Litbang Kumdil MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
3.	Sosialisasi Implementasi Aplikasi SAKTI	3 orang	Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Kompetensi SDM

4.	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inpassing Angkatan II Tahun 2020	1 orang	Perpustakaan Nasional	Peningkatan Kompetensi SDM
5.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat Hakim Mediator Bagi Hakim Peradilan Umum	2 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
6.	Pelatihan Sertifikat Hakim, Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan English Effective Presentation	2 orang	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
7.	Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Anak (SPPA)	2 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
8.	Pelatihan Online Design Thinking For Innovation (Desain Berpikir Untuk Inovasi)	1 orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
9.	Pelatihan Online English Presentation	3 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
10.	Pelatihan Online Practical Problem Solving (Pemecahan Masalah Praktis)	1 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
11.	Diklat Penjeingan Auditor Madya secara E-Learning	2 orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM

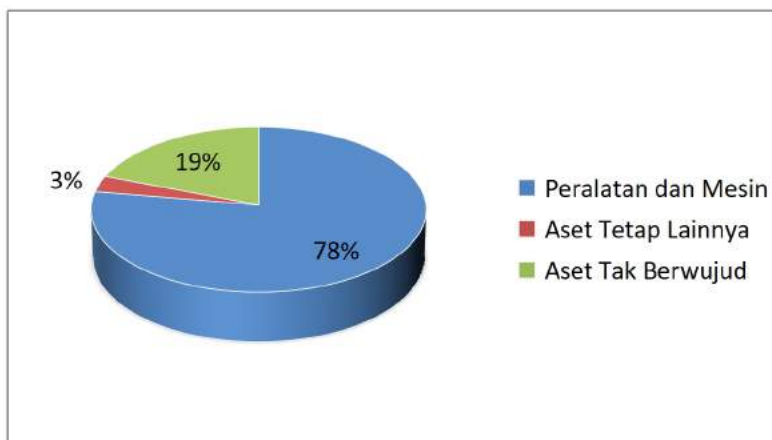
12.	Pemanggilan Peserta TOT (Training of Trainer)	1 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
13.	Pelatihan Online English Effective Presentation gelombang III Tahap I Kelas 19 s.d 36 Tahun 2020	3 orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
14.	Pelatihan Online Leader as a Coach Batch 4 Tahun 2020	1 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
15.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Hki BAGI Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	2 Orang	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
16.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2020	1 orang	Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara	Peningkatan Kompetensi SDM
17.	Bimtek SDM kearsipan Khusus bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/Inpassing secara daring	1 orang	Arsip Nasional Republik Indonesia	Peningkatan Kompetensi SDM

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 dikelompokkan :

➤ 2099 unit peralatan dan mesin	Rp. 13.144.648.301
➤ 2.290 buah aset tetap lainnya	Rp. 535.403.685
➤ 12 unit aset tak berwujud	Rp. 3.254.333.180
Total pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 16.934.385.166

Grafik 3.1 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan



Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada :

a) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2020, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2020 :

1) Pembelian

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2020 adalah 219 Unit dengan Total Rp 424.994.125 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	Rak Kayu	1	2.187.500
2.	CCTV	1	101.963.625
3.	Mesin Absensi	2	10.780.000

4.	LCD Projector/Infocus	1	58.710.000
5.	Alat perekam suara (voice pen)	5	5.197.500
6.	Kursi besi/metal	180	67.340.160
7.	Equalizer	1	14.250.000
8.	Loudspeaker	4	8.530.000
9.	Mimbar/podium	1	9.210.840
10.	Lampu	1	3.375.000
11.	Audio mixing console	1	2.750.000
12.	Microphone/wireless mic	6	52.863.000
13.	Power amplifier	1	18.532.500
14.	Camera conference	1	11.324.000
15.	P.C Unit	5	45.380.000
16.	Printer	6	9.000.000
17.	Scanner	2	3.600.000
	TOTAL		424.994.125

b) Pemeliharaan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sebagian besar hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 2099 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

1) Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan terhadap P. C Unit, Printer, Laptop dan Televisi

2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas pada Badan Pengawasan tahun 2020, telah dilakukan pada 4 unit station wagon. Dimana kendaraan dinas tersebut melekat ke jabatan masing-masing pejabat eselon 3.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Service AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spoorring & Balancing dan Pergantian ban.

3) Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Untuk menunjang operasional perkantoran, disediakan 10 unit station wagon, 1 unit Micro Bus dan 4 unit sepeda motor.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart,

Servise AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, sporing & Balancing dan Pergantian ban.

c) Penghapusan BMN

Pada Tahun 2020 tercatat ada 46 Buah Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilakukan penghapusan antara lain 2 buah mesin absensi, 17 buah unit power supply (UPS), 3 buah Handy Talky (HT), 1 buah P.C Unit, 5 buah laptop, dan 18 buah printer.

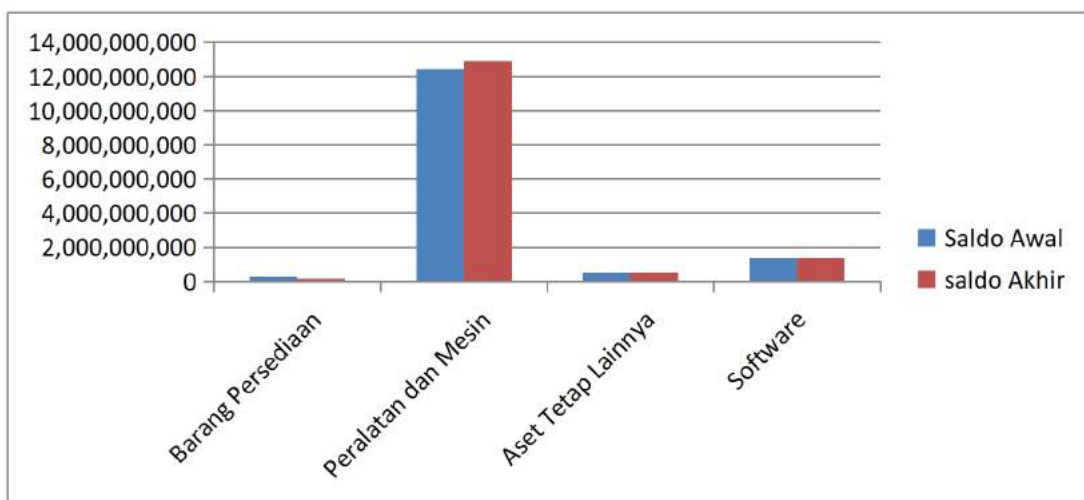
d) Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Badan Pengawasan per 30 September 2020 sebesar Rp173.672.796 (*seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari:

- saldo awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp108.628.917(*seratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah*)
- total pembelian persediaan selama Tahun 2020 (sampai dengan bulan september) sebesar Rp 461.023.900 (*empat ratus enam puluh satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*)
- total distribusi sebesar Rp379.654.811(*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah*)

Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI T.A 2020 dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2 Pengelola Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara



**HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tujuan dari dilakukannya Opname Fisik Barang Persediaan untuk memastikan kesamaan antara data di Aplikasi Persediaan dengan jumlah barang yang riil, yang rinciannya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang				Kondisi Barang	
			Menurut Laporan persediaan		Hasil cek Fisik		Baik	Usang
		11511						
	ALAT TULIS	1010301001						
1	Bolpoint Faster	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
2	Pulpen Gel (Uniball)	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
3	Pensil 2B	000003	52	Buah	52	Buah	Baik	-
4	Spidol Marker Biru	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
5	Stabillo Boss (warna Warni)	000005	39	Buah	39	Buah	Baik	-
6	Spidol Whiteboard	000006	27	Buah	27	Buah	Baik	-
7	Pulpen Faster Tutup (C600)	000007	156	Buah	156	Buah	Baik	-
8	Buku Ekpedisi	000008	46	Buku	46	Buku	Baik	-
9	Spidol Kecil Warna Warni	000009	3	Buah	3	Buah	Baik	-
10	Snowman V3 Ballpoint	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
11	Unibal Boxy	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
12	Ordner Gungyu 401	000012	11	Buah	11	Buah	Baik	-
13	Ordner Gungyu 403	000013	21	Buah	21	Buah	Baik	-
14	Ball Poin Signa	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
15	Pulpen Kenko	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
16	Pulpen Joyko Gel warna biru	000016	194	Buah	194	Buah	Baik	-
17	Pulpen Joyko Gel warna hitam	000017	109	Buah	109	Buah	Baik	-
18	Baterai ABC besar	000018	0	Set	0	Set	-	-
19	Ballpoin Baliner	000019	48	Buah	48	Buah	Baik	-
20	Pulpen Unibal Gelimpact	000020	339	Buah	339	Buah	Baik	-
21	Map merah Logo	000021	2337	Lembar	2337	Lembar	Baik	-
22	Map kuning Logo	000022	2.049	Lembar	2049	Lembar	Baik	-
23	Map hijau Logo	000023	1462	Lembar	1462	Lembar	Baik	-
24	Map biru logo	000024	2025	Lembar	2025	Lembar	Baik	-
25	Map orange logo	000025	900	Lembar	900	Lembar	Baik	-
26	Pensil HB	000026	0	Buah	0	Buah	-	-

27	17	Pulpen Joyko Gel warna hitam	000017	69	Buah	69	Buah	Baik	-
28	18	Baterai ABC besar	000018	0	Set	0	Set	-	-
29	19	Ballpoint Baliner	000019	27	Buah	27	Buah	Baik	-
30	20	Pulpen Unibal Gelimpact	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
31	21	Map merah Logo	000021	547	Lembar	547	Lembar	Baik	-
32	22	Map kuning Logo	000022	####	Lembar	1160	Lembar	Baik	-
33	23	Map hijau Logo	000023	810	Lembar	810	Lembar	Baik	-
34	24	Map biru logo	000024	960	Lembar	960	Lembar	Baik	-
35	25	Map orange logo	000025	600	Lembar	600	Lembar	Baik	-
36	26	Pensil HB	000026	0	Buah	0	Buah	-	-
37	27	Pulpen Kenko Gel Hitam	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
38	28	Ballpoint C8 Faster	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
39	29	Pensil mekanik rotring	000029	16	Buah	16	Buah	Baik	-
40	30	Isi pensil rotring 0,5	000030	20	Pad	20	Pad	Baik	-
41	31	Joyko pen stand	000031	5	Buah	5	Buah	Baik	-
42	32	Ballpoint Promosi	000032	0	Buah	0	Buah	-	-
43	33	Pulpen faster F6	000033	0	Buah	0	Buah	-	-
44	34	Pulpen faster EC 8	000034	0	Buah	0	Buah	-	-
45	35	Pulpen Scotch Magic	000035	0	Buah	0	Buah	-	-
46	36	Ballpoint faster C6	000036	12	Buah	12	Buah	Baik	-
47	37	Pulpen Hero 956	000037	0	Buah	0	Buah	-	-
48	38	Spidol Permanen	000038	12	Buah	12	Buah	Baik	-
49	39	Pulpen 4 warna	000039	28	Buah	28	Buah	Baik	-
50	40	Pulpen pantel pelantikan	000040	0	Buah	0	Buah	-	-
51	41	Snowman V5 Ballpoint	000041	55	Buah	55	Buah	Baik	-
52	42	Pulpen penghapus	000042	8	Buah	8	Buah	Baik	-
53		TINTA TULIS, TINTA STEMPEL	1010301002			0			
54	43	Stempel Perma	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
55	44	Stempel Colop	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
56	45	Tinta Colop	000004	14	Buah	14	Buah	Baik	-
57	46	Tinta Hero	000005	0	Botol	0	Botol	-	-
58	47	Isi pulpen pantel	000006	0	Botol	0	Botol	-	-
59		PENJEPIT KERTAS	1010301003			0			
60	48	Paper Clips	000001	0	Kotak	0	Kotak	-	-
61	49	Binder Clips 107	000002	35	Kotak	35	Kotak	Baik	-
62	50	Binder Clips 155	000003	13	Kotak	13	Kotak	Baik	-
63	51	Klip	000004	0	Kotak	0	Kotak	-	-
64	52	Binder Clip 111	000005	29	Kotak	29	Kotak	Baik	-
65	53	Binder Clip 100	000006	0	Kotak	0	Kotak	-	-
66	54	Binder Clip No 260	000007	31	Kotak	31	Kotak	Baik	-
67	55	Binder Clip 200	000008	14	Kotak	14	Kotak	Baik	-
68	56	Peper Clip Warna	000009	50	Kotak	50	Kotak	Baik	-
69	57	Push Pin	000010	8	Kotak	8	Kotak	Baik	-
70	58	Pembolong Kertas	000011	13	buah	13	buah	Baik	-
71	59	Acco besi	000012	979	Set	979	Set	Baik	-
72	60	Stand book	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
73	61	Binder Clip 105	000014	0	Kotak	0	Kotak	-	-
74	62	Spiral Plastik UK 1/4"	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
75	63	Spiral Plastik UK 5/16"	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
76	64	Spiral Plastik UK 3/8"	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
77	65	Spiral Plastik UK 7/16"	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
78	66	Spiral Plastik UK 1/2"	000019	0	Buah	0	Buah	-	-
79	67	Spiral Plastik UK 9/16"	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
80	68	Spiral Plastik UK 5/8"	000021	0	Buah	0	Buah	-	-
81	69	Spiral Plastik UK 3/4"	000022	0	Buah	0	Buah	-	-
82	70	Spiral Plastik UK 1"	000023	0	Buah	0	Buah	-	-
83	71	Spiral Plastik UK 1 1/4"	000024	0	Buah	0	Buah	-	-
84	72	Spiral Plastik UK 1 1/8"	000025	0	Buah	0	Buah	-	-
85	73	Spiral Plastik UK 1 1/2"	000026	0	Buah	0	Buah	-	-
86	74	Spiral Plastik UK 1 3/4"	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
87	75	Spiral Plastik UK 2"	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
88		PENGHAPUS/KOREKTOR	1010301005			0			
89	76	Penghapus Mesin Ketik 1 BM	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
90	77	Penghapus Pensil	000002	32	buah	32	buah	Baik	-
91	78	Tip Ex Pantel	000003	7	Buah	7	Buah	Baik	-
92	79	Penghapus Mesin Ketik	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
93	80	Penghapusan pulpen	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
94	81	Penghapusan whaiteboard	000006	3	Buah	3	Buah	Baik	-
95	82	Stabilo swing boss	000007	17	Buah	26	Buah	Baik	-
96	83	Tip Ex Correction	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
97		BUKU TULIS	1010301005			0			
98	84	Buku Register Besar	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
99	85	Buku Register Sedang	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
100	86	Buku Register Kecil	000003	0	Buku	0	Buku	-	-
101	87	Buku Register Panjang	000004	0	Buku	0	Buku	-	-
102	88	Buku Pengawasan Kredit	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
103	89	Buku Tanda Terima LHP	000006	52	Buku	52	Buku	Baik	-
104	90	Buku Bon Permintaan ATK	000007	20	Buku	20	Buku	Baik	-
105	91	Dokumen Pengaduan	000008	0	Set	0	Set	-	-
106	92	Standard Buku IMAX	000009	0	Buku	0	Buku	-	-
107	93	Buku Agenda Folio 500	000010	22	Buku	22	Buku	Baik	-
108	94	Buku Agenda Folio 200	000011	18	Buku	18	Buku	Baik	-
109	95	Buku Agenda Folio 100	000012	19	Buku	19	Buku	Baik	-
110	96	Formulir hasil penelaahan	000013	23	Buku	23	Buku	Baik	-
111	97	Tanda terima surat	000014	12	Buku	12	Buku	Baik	-
112	98	Peminjaman inventaris	000015	4	Buku	4	Buku	Baik	-
113	99	Not box	000016	0	Buku	0	Buku	-	-
114	100	Kwitansi	000017	12	Buku	12	Buku	Baik	-

115	101	Buku Daftar Tamu	000018	30	Buku	30	Buku	Baik	-
116		ORDNER DAN MAP	1010301006			0			
117	102	Stop Map	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
118	103	Map Shellhecter	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
119	104	Odner	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
120	105	Box File	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
121	106	Map LHP	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
122	107	Map Biasa	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
123	108	Rado Arch File	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
124	109	Map Tulang Badan Pengawasan	000008	0	Lembar	0	Lembar	-	-
125	110	Map Bludru	000009	0	Lembar	0	Lembar	-	-
126	111	Box file pakai tutup	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
127	112	Spring file plastik	000011	281	Buah	281	Buah	Baik	-
128	113	Box file bantex	000012	55	Buah	55	Buah	Baik	-
129	114	Clear holder F4	000013	10	Buah	10	Buah	Baik	-
130	115	Ordner bantex folio	000014	109	Buah	109	Buah	Baik	-
131	116	Bisnis file plastik	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
132	117	Dokumen Keeper Semi Kulit	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
133	118	Notepad Holder Kulit	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
134	119	Map Plastik L	000019	59	Lembar	59	Lembar	Baik	-
135	120	Map Agno Pengaduan	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
136		PENGGARIS	1010301007			0			
137	121	Penggaris Besi 30 CM	000001	7	Buah	7	Buah	Baik	-
138	122	Penggaris plastik 30 CM	000002	3	Buah	3	Buah	Baik	-
139	123	Penggaris Besi 50 CM	000003	11	Buah	11	Buah	Baik	-
140		CUTTER	1010301008			0			
141	124	Gunting Besar/Kecil/Sedang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
142	125	Cutter Besar (L-500)	000002	3	Buah	3	Buah	Baik	-
143	126	Gunting 838 (sedang)	000003	19	Buah	19	Buah	Baik	-
144	127	Gunting 848 (besar)	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
145	128	Cutter A-300	000005	25	Buah	25	Buah	Baik	-
146	129	Serutan pensil	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
147	130	Isi cutter A-300	000007	21	Pad	21	Pad	Baik	-
148	131	Serutan meja pensil	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
149		PITA MESIN KETIK	1010301009			0			
150	132	Pita Mesin Ketik IBM	000001	12	Buah	12	Buah	Baik	-
151	133	Pita Mesin Ketik Manual	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
152	134	Pita mesin ketik Royal	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
153		ALAT PEREKAT	1010301010			0			
154	135	Lem kertas	000001	0	Botol	0	Botol	-	-
155	136	Lem Indrakol	000002	0	Botol	0	Botol	-	-
156	137	Lem Glue	000003	7	Botol	7	Botol	Baik	-
157	138	Double Solatip	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
158	139	Singel Solatip	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
159	140	Lem banteng	000007	0	Kaleng	0	Kaleng	-	-
160	141	Lem joyko cair	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
161	142	Lem dollar fixol	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
162	143	Lem glue stick	000010	45	Buah	45	Buah	Baik	-
163	144	Dispenser tape	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
164	145	Page marker assorted 3M	000012	0	Pad	0	Pad	-	-
165	146	Post it sign here 3M	000013	20	Pad	20	Pad	Baik	-
166	147	Scotch tape magic	000014	9	Pad	9	Pad	Baik	-
167	148	Post it note tape flag 3M	000015	30	Pad	30	Pad	Baik	-
168	149	Post it tape flag warna warni	000016	10	pad	10	pad	Baik	-
169	150	Post it 654 Warna	000017	0	Pad	0	Pad	-	-
170	151	Double selotip 3M	000018	10	Pad	10	Pad	Baik	-
171		STADLER HD	1010301011			0			
172	152	Stapler HD 10 Max	000001	36	Buah	36	Buah	Baik	-
173	153	Stapler HD 50 Max	000002	25	Buah	25	Buah	Baik	-
174	154	Stapler Remover	000003	4	Buah	4	Buah	Baik	-
175		STAPLES	1010301011						
176	155	Staples HD 12 N/24	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
177		ISI STAPLES	1010301012						
178	156	Isi staples 1213 Max	000001	28	Kotak	28	Kotak	Baik	-
179	157	Isi staples 1210 Max	000002	19	Kotak	19	Kotak	Baik	-
180		BARANG CETAKAN	1010501008						
181	158	Buku Peran aktif hakim dlm perkara Perdata	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
182	159	Buku Pemulihan Peradilan	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
183		ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	1010301999						
184	160	Stabilo Boss	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
185	161	Isi Stapler No.3-1 M	000002	290	Kotak	290	Kotak	Baik	-
186	162	Isi Staples No.10-1M	000003	308	Kotak	308	Kotak	Baik	-
187	163	Isi Staples No.9/16"	000004	16	Kotak	16	Kotak	Baik	-
188	164	Isi staples No.5/8"	000005	23	Kotak	23	Kotak	Baik	-
189	165	Isi Cutter Besar	000006	89	Kotak	89	Kotak	Baik	-
190	166	Kalkulator Casio	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
191	167	Clipboard Plastik	000008	6	Buah	6	Buah	Baik	-
192	168	Paper Tray	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
193	169	Desk Organizer	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
194	170	Data bag eagle 305	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
195	171	Papan whiteboard	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
196	172	Pembolong No. 85B Kenko	000013	4	Buah	4	Buah	Baik	-
197	173	Papan Whiteboard 45x60	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
198	174	Joyko numbering	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
199	175	Tas Rakor	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
200	176	Kantong Pensil	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
201		clipboard Plastik	1010302001						
202	177	Kertas HV570 gram A4	000001	136	Rim	136	Rim	Baik	-

203	178	Kertas HVS 70 gram F4	000002	16	Rim	16	Rim	Baik	-
204	179	Kertas HVS 80 gram A4	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
205	180	Kertas HVS A3	000004	1	Rim	1	Rim	Baik	-
206		BERBAGAI KERTAS	1010302002						
207	181	Kertas Fax	000001	3	Roll	3	Roll	Baik	-
208	182	Kertas Lembar Disposisi	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
209	183	Kertas Memo Kecil	000003	17	buku	17	buku	Baik	-
210	184	Kertas memo besar	000004	7	buku	7	buku	Baik	-
211	185	Kartu Persediaan	000005	300	Lembar	300	Lembar	Baik	-
212	186	Kartu Berobot	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
213	187	Post It 654	000007	1	Pad	1	Pad	Baik	-
214	188	Label T/J A4	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
215	189	Box arsip/kardus	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
216	190	Kertas label Tom&Jerry	000010	297	Pak	297	Pak	Baik	-
217	191	Glossy photo paper	000011	27	Pak	27	Pak	Baik	-
218	192	Glossy photo stiker	000012	6	Pak	6	Pak	Baik	-
219	193	Tissu Kotak	000013	0	Kotak	0	Kotak	Baik	-
220	194	Tissu Roll	000014	0	Roll	0	Roll	Baik	-
221		KERTAS COVER	1010302003						
222	195	Sampul Kertas Belakang	000001	0	Lembar	0	Lembar	-	-
223	196	Kertas Film F4	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
224	197	Kertas Cover	000003	578	Lembar	578	Lembar	Baik	-
225	198	Kertas Cover F4	000004	0	Lembar	0	Lembar	-	-
226	199	Kertas Cover A4	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
227		AMPLOP	1010302004						
228	200	Amplop Dinas kecil	000001	1105	Lembar	1105	Lembar	Baik	-
229	201	Amplop Putih No.110	000002	67	Pak	67	Pak	Baik	-
230	202	Amplop Putih No.90	000003	12	Pak	12	Pak	Baik	-
231	203	Amplop dinas besar	000004	176	Lembar	176	Lembar	Baik	-
232	204	Amplop Dinas bertelinga	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
233		KOP SURAT	1010302005						
234	205	Kop Garuda Tengah Polos	000001	1	Rim	1	Rim	Baik	-
235	206	Kertas Kop Surat Tugas	000002	0	Rim	0	Rim	-	-
236	207	Kertas Kop Surat	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
237	208	Lembar disposisi	000004	0	Rim	0	Rim	-	-
238	209	Kop Surat MARI	000005	26	Rim	26	Rim	Baik	-
239	210	Kop ST timbul	000006	31	Rim	31	Rim	Baik	-
240	211	Kop logo garuda converor	000007	4	Rim	4	Rim	Baik	-
241	212	Kop garuda converor	000008	1	Rim	1	Rim	Baik	-
242		KERTAS DAN COVER LAINNYA	1010302999						
243	213	Kertas pembatas A4	000001	0	Rim	0	Rim	-	-
244	214	Sampul plastik	000002	928	Lembar	928	Lembar	Baik	-
245	215	Pembatas kertas warna-warni	000003	10	Rim	10	Rim	Baik	-
246		TINTA CETAK	1010303002						
247	216	Tinta Print Laser Jet 7560A	000001	0	buah	0	buah	-	-
248	217	Tinta Print Laser Jet 7561A	000002	0	buah	0	buah	-	-
249	218	Tinta Print Laser Jet 7562A	000003	0	buah	0	buah	-	-
250	219	Tinta Print Laser Jet 7563A	000004	0	buah	0	buah	-	-
251	220	Tinta Stempel	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
252	221	Tinta Canon 36	000006	0	buah	0	buah	-	-
253	222	Tinta Canon 35	000007	0	buah	0	buah	-	-
254	223	Karbon mesin fax	000008	0	buah	0	buah	-	-
255	224	Karbon mesin fax Panasonic	000009	5	buah	5	buah	Baik	-
256		PLAT CETAK	1010303999						
257	225	huruf Akrilik	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
258	226	Backdrop	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
259		BAHAN CETAK LAINNYA	1010303999						
260	227	Lakban Hitam Besar	000001	25	buah	25	buah	Baik	-
261	228	Bantalan Stempel	000002	7	buah	7	buah	Baik	-
262	229	Lakban Kecil	000003	38	buah	38	buah	Baik	-
263	230	Lakban Sedang	000004	45	buah	45	buah	Baik	-
264	231	Lakban Bening	000006	4	Buah	4	Buah	Baik	-
265	232	Lakban Coklat	000007	0	buah	0	buah	-	-
266	233	Celotape	000008	0	buah	0	buah	-	-
267	234	Lem Aibon	000009	0	buah	0	buah	-	-
268	235	Gunting Besar	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
270	236	Kertas countinuous form 9 1/1x1 PLY	000001	0	Box	0	Box	-	-
271		PITA PRINTER							
272	237	Pita Epson LQ 2190	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
273		TINTA/TONER PRINTER	1010304004						
274	238	Tinta 94 (black)	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
275	239	Tinta 95 (Color)	000002	1	Buah	1	Buah	Baik	-
276	240	Toner HP 12 A	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
277	241	Tinta HP Deskjet T95	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
278	242	Tinta Printer HP Laserjet 2700	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
279	243	Tinta HP Deskjet T94	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
280	244	Tinta Printer Laserjet 7560A	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
281	245	Tinta Printer Laserjet 7561A	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
282	246	Tinta Printer Laserjet 7562A	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
283	247	Tinta Printer Laserjet 7563A	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
284	248	Tinta HP 57	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
285	249	Tinta HP 56	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
286	250	Tinta Canon FW 3	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
287	251	Toner HP 85 A	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
288	252	Tinta Epson L800 Hitam	000015	8	Buah	8	Buah	Baik	-
289	253	Tinta HP P3015	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
290	254	Tinta Xerox Phaser 3428	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
291	255	Data Print Hitam (canon tetes)	000018	0	Buah	0	Buah	-	-

381	333	Nampan	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
382	334	Pisau Buah	000002	0	Lusin	0	Lusin	-	-
383	335	Sendok Garpu	000003	0	Lusin	0	Lusin	-	-
384	336	Sendok Sayur	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
385	337	Gelas Kaca Gede	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
386	338	Piring Sangu	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
387	339	Piring	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
388	340	Mangkok	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
389	341	Cangkir Sangu	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
390	342	Cangkir Set	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
391	343	Sendok makan	000013	0	Lusin	0	Lusin	-	-
392	344	PENGHARUM RUANGAN	1010305012						
393	345	Kapur Barus	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
394	346	Pewangi gantung	000002	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
395	347	By fresh	000003	0	Botol	0	Botol	-	-
396	348	Mesin Aerosol/Pewangi Glade	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
397	349	Carfresh	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
398	350	Toilet Boll	000006	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
399	351	Mesin pengharum ruangan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
400	352	Pengharum atas meja	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
401	353	Isi Refill Glade	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
402		PERABOT KANTOR LAINNYA	1010305999						
403	354	Spons Cuci piring	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
404	355	Kanebo	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
405	356	Kain kasa	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
406	357	Obeng	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
407	358	Troli Kecil	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
408	359	Troli Besar	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
409		KABEL LISTRIK	10100306001						
410	360	Kabel NYM 2x2,5 50 M	000001	0	Roll	0	Roll	-	-
411	361	Kabel Roll	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
412	362	Kabel NYM 3x1,5 50M	000003	0	Roll	0	Roll	-	-
413	363	Kabel NYM 3x2,5 50 M	000004	0	Roll	0	Roll	-	-
414	364	Kabel NYM HY 2x0,75 50M	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
415		LAMPU LISTRIK	1010306002						
416	365	Lampu Philips 22 Watt	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
417	366	Lampu Philip 36 Watt	000002	0	buah	0	buah	-	-
418		STOP KONTAK	1010306003						
419	367	Kabel Colokan 5 M	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
420		SAKLAR	1010306004						
421	368	Saklar 4 lubang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
422	369	Saklar 3 lubang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
423	370	Saklar 2 lubang	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
424		Balast	1010306006						
425	371	Balast	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
426		BATU BATERAI	1010306010						
427	372	Betterai Alkalin (AA)	000001	30	set	30	set	Baik	-
428	373	Batu Baterai Alkalin (AAA)	000002	37	set	37	set	Baik	-
429	374	Battery kotak 9 volt	000003	2	Buah	2	Buah	Baik	-
430		ALAT LISTRIK LAINNYA	1010306999						
431	375	Rumah lampu Down light	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
432		ATRIBUT	1010307006						
433	376	Kartu Peserta & Tali	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
434		ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	1010309999						
435	377	Buku Agenda Rakor	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
436	378	Nam Tag	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
437	379	Tas Laptop Predator Cartenz 14"	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
438	380	Tas Laptop Prodigie Cartenz RC 14"	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
439	381	Tas Laptop Lucerne LT + RC Cartenz 14"	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
440	382	Tas Laptop Inicode Cartenz 14"	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
441	383	Tas Pemeriksaan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
442	384	Koper Pemberkasan Pemeriksaan	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
443	385	Koper Pemberkasan Pemeriksaan 1	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
444	386	Materai 3000	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
445	387	Materai 6000	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
446		OBAT CAIR							
447	388	Obat Nyamuk	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
448			115128						
449		BARANG PERSEDIAAN	1010501008						
450	389	Tas Sosialisasi	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
451	390	Tas Jinjing Sosialisasi	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
452	391	Buku Manajemen Pengawasan	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
453	392	Buku Himpunan Peraturan Perundang	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
454	393	Buku Pemulihan Peradilan Bawas.	000005	0	Buah	0	Buah	-	-

C. Pengelolaan Keuangan

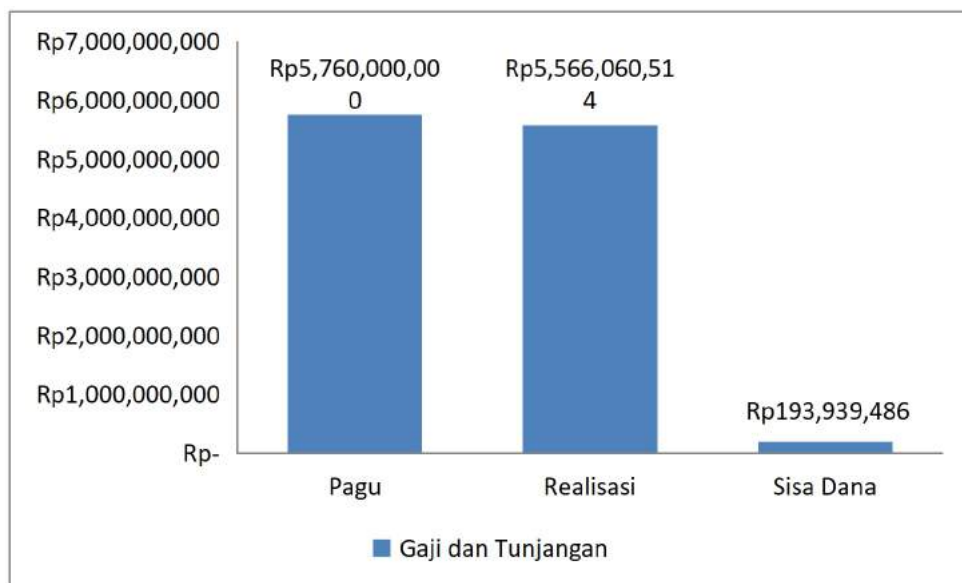
Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan jumlah PAGU (REVISI KE - 4 tanggal 12 Oktober 2020) sebesar Rp. 31.972.336.000,- terdiri dari:

1. BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2020 yaitu:

- **Pagu** : **Rp. 5,760,000,000,-**
(lima milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah)
- **Realisasi** : **Rp. 5.566.060.514 (96,63)**
(lima milyar lima lima ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu lima ratus empat belas rupiah)
- **Sisa** : **Rp. 193.939.486,-**
(seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)

Grafik 3.14 Belanja Pegawai Tahun 2020

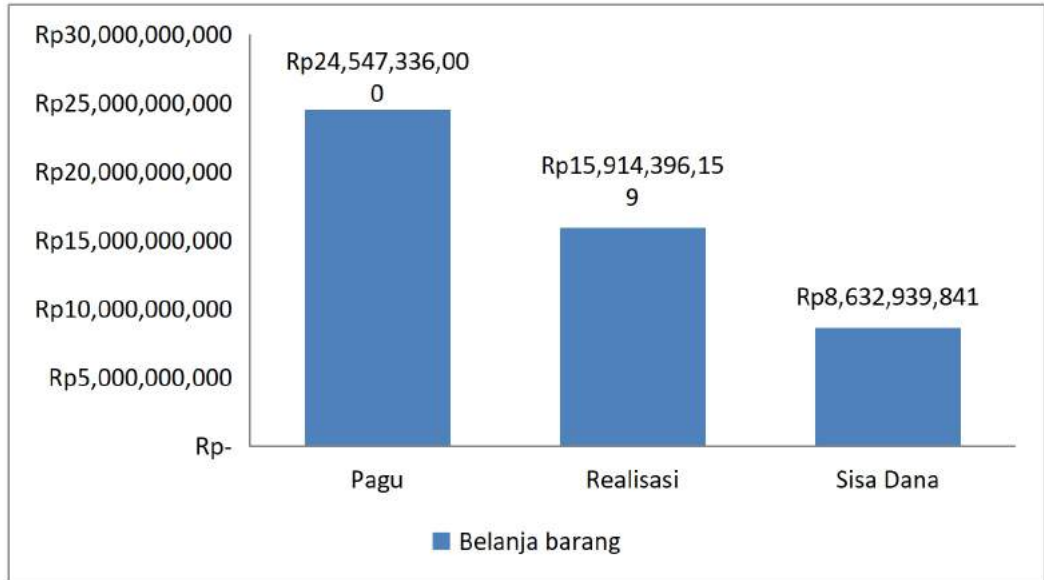


2. BELANJA BARANG

Pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2020 yaitu:

- a. **Pagu** : **Rp. 24.547.336.000,-**
(dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- b. **Realisasi** : **Rp. 15.914.396.159,-**
(lima belas milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)
- c. **Sisa** : **Rp. 8.632.939.841,-**
(delapan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

Grafik 3.15 Belanja Barang Tahun 2020



3. BELANJA MODAL

Pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2020 yaitu:

- a. **Pagu** : **Rp. 1.665.000.000,-**
(satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah)
- b. **Realisasi** : **Rp. 424.994.125,-**
(empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- c. **Sisa** : **Rp. 1.240.005.875,-**
(satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Grafik 3.16 Belanja Modal Tahun 2020



Tabel 3.29 Data Per Output & Satuan Belanja TA 2020

Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 005.07.1.663136/2020 Tanggal 12 November 2019

1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur	Rp 4.471.053.000	Rp 2.776.558.336	Rp 1.694.494.664
1077.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I[Base Line]	Rp 677.323.000	Rp 612.382.160	Rp 64.940.840
062	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas Wilayah I	Rp 677.323.000	Rp 612.382.160	Rp 64.940.840
1077.965	Layanan Audit Internal[Base Line]	Rp 3.793.730.000	Rp 2.164.176.176	Rp 1.629.553.824
051	Pemeriksaan Audit Khusus	Rp 1.468.867.000	Rp 1.001.526.399	Rp 467.340.601
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.468.867.000	Rp 1.001.526.399	Rp 467.340.601
052	Pelaksanaan Audit Internal	Rp 1.487.639.000	Rp 576.351.432	Rp 911.287.568
A	Pemeriksaan Reguler	Rp 671.881.000	Rp 243.587.020	Rp 428.293.980
B	Pemeriksaan Kinerja	Rp 793.327.000	Rp 310.333.412	Rp 482.993.588
E	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 22.431.000	Rp 22.431.000	Rp -
053	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp 807.224.000	Rp 585.312.345	Rp 221.911.655
A	Pemeriksaan Monitoring	Rp 807.224.000	Rp 585.312.345	Rp 221.911.655
054	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	Rp 30.000.000	Rp 986.000	Rp 29.014.000
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur	Rp 4.961.452.000	Rp 3.698.749.504	Rp 1.262.702.496
1078.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II[Base Line]	Rp 943.707.000	Rp 848.761.090	Rp 94.945.910
062	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas Wilayah II	Rp 713.207.000	Rp 619.651.090	Rp 93.555.910
064	Pelaporan dan Pengusulan Satker Menuju WBK Wilayah II	Rp 230.500.000	Rp 229.110.000	Rp 1.390.000
1078.965	Layanan Audit Internal[Base Line]	Rp 4.017.745.000	Rp 2.849.988.414	Rp 1.167.756.586
051	Pemeriksaan Audit Khusus	Rp 1.844.591.000	Rp 1.553.888.830	Rp 290.702.170
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.844.591.000	Rp 1.553.888.830	Rp 290.702.170
052	Pelaksanaan Audit Internal	Rp 1.487.525.000	Rp 772.688.259	Rp 714.836.741
A	Pemeriksaan Reguler	Rp 488.781.000	Rp 282.309.740	Rp 206.471.260
B	Pemeriksaan Kinerja	Rp 575.388.000	Rp 230.971.684	Rp 344.416.316
C	Pemeriksaan Barang dan Jasa	Rp 25.920.000	Rp 25.920.000	Rp -
E	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 18.512.000	Rp 18.511.035	Rp 965
F	Reviu LK	Rp 79.280.000	Rp 78.079.100	Rp 1.200.900
G	Reviu LKjIP	Rp 142.464.000	Rp 39.159.600	Rp 103.304.400
H	Reviu Pengelolaan Anggaran	Rp 79.100.000	Rp 61.368.000	Rp 17.732.000
I	Reviu Hibah	Rp 39.040.000	Rp 15.489.100	Rp 23.550.900
J	Pernyataan telah di Reviu / Verifikasi	Rp 39.040.000	Rp 20.880.000	Rp 18.160.000
053	Reviu Perencanaan Anggaran	Rp 64.900.000	Rp 64.281.000	Rp 619.000
054	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp 590.729.000	Rp 458.157.325	Rp 132.571.675
A	Pemeriksaan Monitoring	Rp 590.729.000	Rp 458.157.325	Rp 132.571.675
055	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	Rp 30.000.000	Rp 973.000	Rp 29.027.000
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp 14.486.917.000	Rp 10.811.300.624	Rp 3.675.616.376
1079.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I[Base Line]	Rp 3.656.236.000	Rp 2.470.844.303	Rp 1.185.391.697
051	Penyusunan Rencana Program	Rp 157.500.000	Rp 78.540.795	Rp 78.959.205
A	Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp 157.500.000	Rp 78.540.795	Rp 78.959.205
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 2.083.906.000	Rp 1.452.637.668	Rp 631.268.332
A	Consulting Proby Audit	Rp 405.200.000	Rp 405.199.622	Rp 378
B	Pemeriksaan Proby Audit	Rp 855.724.000	Rp 560.563.623	Rp 295.160.377
D	TLHP BPK	Rp 100.000.000	Rp 87.293.600	Rp 12.706.400
E	LO Pendampingan	Rp 100.000.000	Rp 44.825.450	Rp 55.174.550
F	Pemeriksaan lintas Propinsi / tujuan tertentu / cek fisik / saber pungli / investigasi / unit intelejen / sidak	Rp 249.999.000	Rp 141.554.044	Rp 108.444.956
G	Pemanggilan dan perjalanan lainnya	Rp 66.970.000	Rp 52.927.129	Rp 14.042.871
H	Perjalanan Pimpinan/Hakim Agung/Supervisi	Rp 202.398.000	Rp 122.319.200	Rp 80.078.800
K	Sidang MKH	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000
M	IACM	Rp 19.265.000	Rp 19.265.000	Rp -
O	Reviu PIPK	Rp 16.950.000	Rp 16.950.000	Rp -
Q	Kerjasama antar pemerintah	Rp 17.400.000	Rp 1.740.000	Rp 15.660.000
054	Pengelolaan Keuangan	Rp 95.000.000	Rp 61.113.000	Rp 33.887.000
A	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 95.000.000	Rp 61.113.000	Rp 33.887.000
055	Pengelolaan Perbendaharaan	Rp 250.800.000	Rp 193.361.200	Rp 57.438.800
A	Penyusunan Administrasi Keuangan	Rp 250.800.000	Rp 193.361.200	Rp 57.438.800
057	Pengelolaan Kepegawaian	Rp 222.400.000	Rp 119.116.900	Rp 103.283.100
A	Pelantikan	Rp 10.000.000	Rp 3.300.000	Rp 6.700.000
C	Assesment	Rp 123.000.000	Rp 84.991.500	Rp 38.008.500
D	Penyusunan Administrasi Kepegawaian	Rp 64.400.000	Rp 30.825.400	Rp 33.574.600
F	E-LHKPN	Rp 25.000.000		Rp 25.000.000
058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Rp 110.000.000	Rp 1.800.000	Rp 108.200.000
A	Penyusunan Administrasi Umum	Rp 60.000.000	Rp 1.800.000	Rp 58.200.000
B	Sistem Informasi Pengawasan	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000
061	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Rp 736.630.000	Rp 564.274.740	Rp 172.355.260
A	Laporan Tahunan Badan Pengawasan MA RI	Rp 39.764.000		Rp 39.764.000
B	Laporan Tahunan MA RI	Rp 216.180.000	Rp 202.719.740	Rp 13.460.260
C	Penyusunan LKjIP Bawas	Rp 54.740.000		Rp 54.740.000

D	Reformasi Birokrasi MA RI dan Penilaian Zona Integritas	Rp 282.130.000	Rp 281.705.000	Rp 425.000
E	Evaluasi SOP, Evaluasi SP	Rp 39.976.000		Rp 39.976.000
F	Penyusunan Administrasi Tata Laksana	Rp 29.920.000	Rp 15.150.000	Rp 14.770.000
H	Pengelolaan TLHP Bawas	Rp 73.920.000	Rp 64.700.000	Rp 9.220.000
1079.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	Rp 1.665.000.000	Rp 424.994.125	Rp 1.240.005.875
057	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 892.394.000	Rp 227.389.000	Rp 665.005.000
058	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 772.606.000	Rp 197.605.125	Rp 575.000.875
1079.994	Layanan Perkantoran[Base Line]	Rp 9.165.681.000	Rp 7.915.462.196	Rp 1.250.218.804
001	Gaji dan Tunjangan	Rp 5.760.000.000	Rp 5.566.060.514	Rp 193.939.486
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 3.405.681.000	Rp 2.349.401.682	Rp 1.056.279.318
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur	Rp 4.453.493.000	Rp 2.955.251.289	Rp 1.498.241.711
5258.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III[Base Line]	Rp 913.675.000	Rp 873.709.779	Rp 39.965.221
062	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas Wilayah III	Rp 913.675.000	Rp 873.709.779	Rp 39.965.221
5258.965	Layanan Audit Internal[Base Line]	Rp 3.539.818.000	Rp 2.081.541.510	Rp 1.458.276.490
051	Pemeriksaan Audit Khusus	Rp 1.297.299.000	Rp 936.291.040	Rp 361.007.960
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.297.299.000	Rp 936.291.040	Rp 361.007.960
052	Pelaksanaan Audit Internal	Rp 1.601.213.000	Rp 720.485.250	Rp 880.727.750
A	Pemeriksaan Reguler	Rp 822.308.000	Rp 362.893.690	Rp 459.414.310
B	Pemeriksaan Kinerja	Rp 749.614.000	Rp 328.300.660	Rp 421.313.340
E	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 29.291.000	Rp 29.290.900	Rp 100
053	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp 611.306.000	Rp 422.176.920	Rp 189.129.080
A	Pemeriksaan Monitoring	Rp 611.306.000	Rp 422.176.920	Rp 189.129.080
054	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	Rp 30.000.000	Rp 2.588.300	Rp 27.411.700
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur	Rp 3.599.421.000	Rp 1.663.591.045	Rp 1.935.829.955
5259.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV[Base Line]	Rp 456.368.000	Rp 435.205.835	Rp 21.162.165
062	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas Wilayah IV	Rp 456.368.000	Rp 435.205.835	Rp 21.162.165
5259.965	Layanan Audit Internal[Base Line]	Rp 3.143.053.000	Rp 1.228.385.210	Rp 1.914.667.790
051	Pemeriksaan Audit Khusus	Rp 1.195.152.000	Rp 479.430.260	Rp 715.721.740
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.195.152.000	Rp 479.430.260	Rp 715.721.740
052	Pelaksanaan Audit Internal	Rp 1.226.460.000	Rp 340.793.810	Rp 885.666.190
A	Pemeriksaan Reguler	Rp 694.558.000	Rp 183.430.757	Rp 511.127.243
B	Pemeriksaan Kinerja	Rp 503.505.000	Rp 128.966.453	Rp 374.538.547
E	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 28.397.000	Rp 28.396.600	Rp 400
053	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp 691.441.000	Rp 407.311.140	Rp 284.129.860
A	Pemeriksaan Monitoring	Rp 691.441.000	Rp 407.311.140	Rp 284.129.860
054	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	Rp 30.000.000	Rp 850.000	Rp 29.150.000

➤ Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.273.336.000 dan mengalami revisi DIPA untuk pemotongan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 sebanyak 8.301.000.000,- menjadi Rp. 31.972.336.000 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp 5.760.000.000
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp 3.405.681.000
- Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas, pembinaan, tindak lanjut pengaduan dan Reviu RKAKL) sebesar Rp 26.901.655.000
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp 1.665.000.000

➤ Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Dalam rangka perkembangan penanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan perkembangan personel Badan Pengawasan. Sehingga diperlukan perkembangan alokasi anggaran setiap tahunnya, berikut perkembangan alokasi anggaran dalam kurun waktu 4 tahun terakhir :

**Tabel 3.30 Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI**

No	Unit	Tahun Anggaran APBN			2020
		2017	2018	2019	
1	Badan Pengawasan	31.400.000.000	33.944.916.000	33.650.412.000	31.972.336.000

D. REGULASI TAHUN 2020

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatur pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2020. Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2020.

2. Reviu RKA K/L

Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian).
- Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat.
- Alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume output riil aset (BMN) existing sebagai basis data pengusulan alokasi.

3. Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ

Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 98,87 % dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai mencapai 94,85% senilai Rp.1.981.642.607.005
- b. Belanja Barang mencapai 96,74% senilai Rp.656.202.890.367
- c. Belanja Modal mencapai 97,68% senilai Rp.317.979.226.236

Terdapat dua Satuan Kerja yang tidak menandatangani kontrak :

- a. Pengadilan Negeri Manokwari dikarenakan anggaran ditarik oleh pusat (Biro keuangan) sehingga tidak dapat dilaksanakan;
- b. Pengadilan Negeri Nanga Bulik, terdapat permasalahan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sehingga untuk pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi pengawasan tidak dapat dilakukan penandatanganan kontrak. Namun untuk konsultasi perencanaan sudah terealisasi sebesar 85%.

Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 85,80 yakni Peringkat Kualitas Belanja Baik.

4. Liaison Officer (LO)

Sampai dengan semester pertama tahun 2020 diperoleh informasi melalui entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2019, menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku Penanggungjawab pemeriksa maka diperlukan Liaison Officer untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan auditee yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif.

Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai Liaison Officer pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya untuk Mahkamah Agung RI.

5. Reviu Revaluasi BMN

Meskipun pada tahun 2020 ini Badan Pengawasan MA RI tidak memiliki target kinerja Reviu Revaluasi BMN, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Secara umum hasil pelaksanaan reviu adalah:

1. Reviu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Reviu atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Probity Audit

Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa.

Probity Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Tahun 2020, probity audit dilaksanakan pada 24 (dua puluh empat) satuan kerja.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan MARI menilai bahwa sidak salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja maupun perilaku Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Tahun 2020 telah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sejumlah 1 (satu) satuan kerja yaitu pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

2. Penyamaran (*Mystery Shopping*)

Mystery Shopping (MS) adalah sebuah tehnik yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan. Penilaian dan pengumpulan informasi ini dilakukan secara rahasia, sedangkan orang yang melakukan tugas rahasia tersebut dinamakan *Mystery Shopper*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengadopsi metode ini sebagai salah satu metode mengukur kualitas pelayanan di pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

Tahun 2020, telah dilakukan *Mystery Shopping pada Wilayah, :*

- Jawa Tengah

- Yogyakarta
- Lampung
- Gorontalo

3. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2020 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 32 satker, Peradilan Agama berjumlah 24 satker, Peradilan TUN berjumlah 0 satker dan Peradilan Militer berjumlah 1 satker.

BAB IV PENGAWASAN

A. PROGRAM PEMBARUAN

1. PENGEMBANGAN APLIKASI PMPZI MAHKAMAH AGUNG

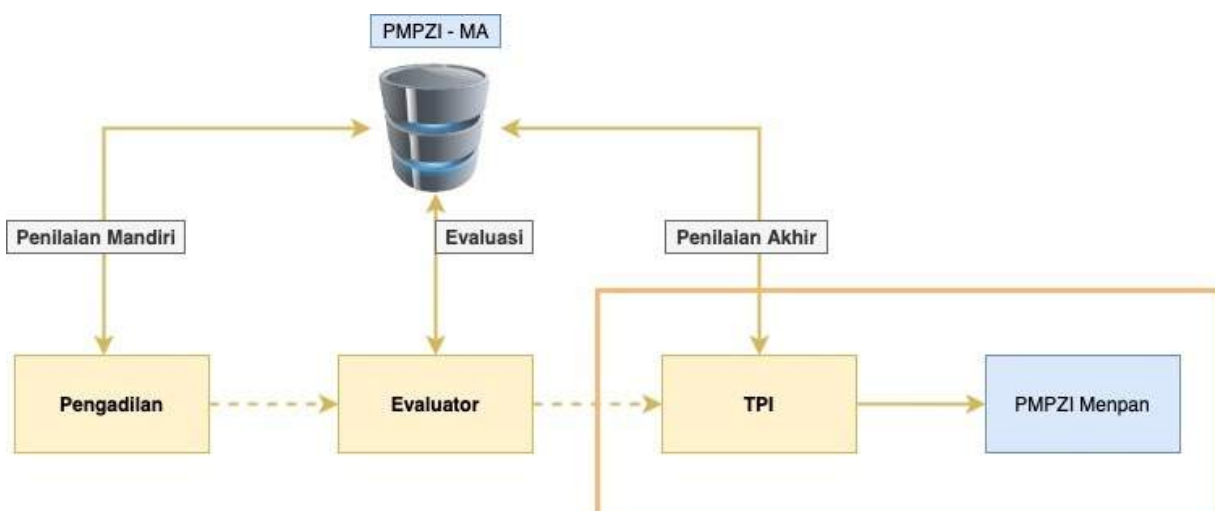
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.316/SEK/OT.01.1/2/2020 tanggal 17 Februari 2020 Hal Permintaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2020 dan SE Menteri PANRB No. 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan waktu penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020 yang semula berakhir di 31 Mei 2020 diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2020 dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a) Jumlah satker yang diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal (TPI) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebanyak 560 satuan kerja.
- b) Waktu pelaksanaan Penilaian yang cukup singkat.
- c) Jumlah Personil TPI yang terbatas dan adanya pandemi COVID-19.

Pembangunan aplikasi PMPZI Mahkamah Agung dilaksanakan oleh tim IT dan Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dapat digambarkan dalam flowchart sebagai berikut :

Alur Bisnis Pembangunan Aplikasi PMPZI (www.pmpzi.badanpengawasan.net)

- a) Topologi alur data PMPZI



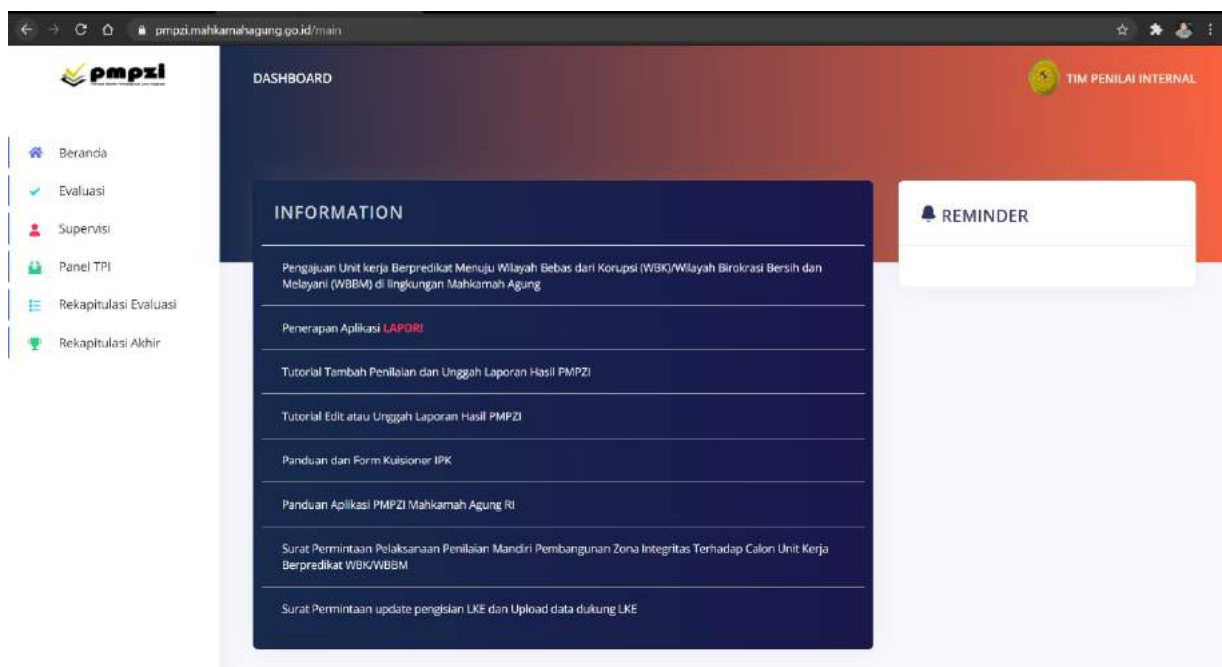
- 1) Aplikasi berbasis web dibangun menggunakan Framework CodeIgniter (HTML5, PHP, Javascript dan Python) dan Database MariaDb.

- 2) Digunakan untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas untuk seluruh Pengadilan di Indonesia dan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
- 3) Terpusat di data center Mahkamah Agung;
- 4) Dirancang, dibangun, dikembangkan dan dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- 5) Dikembangkan pada bulan Februari 2020 dan efektif digunakan pada bulan Maret 2020.
- 6) <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>

b) Fitur Aplikasi

- 1) Penilaian Mandiri Seluruh Pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM;
- 2) Penilaian Evaluasi atas penilaian mandiri Pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM;
- 3) Penilaian Akhir atas evaluasi dan penilaian mandiri seluruh Pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM;
- 4) Unggah File evidence masing-masing instrument dari setiap penilaian mandiri;
- 5) Catatan dari masing-masing tahapan penilaian;
- 6) Export LKE.

c) Tampilan muka dan dashboard Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI



2. KEGIATAN KERJASAMA CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA) DENGAN KPK DAN AIPJ

Pimpinan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* telah melakukan beberapa kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi di Lembaga Peradilan yang salah satu kegiatannya adalah penilaian risiko korupsi (*Corruption Risk Assessment/CRA*) dan evaluasi atas penerapan Pasal 11 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti-korupsi (UNCAC).

Tujuan Kegiatan Kerjasama *Corruption Risk Assessment (CRA)* dengan KPK dan AIPJ :

1. Menilai risiko korupsi (CRA) di pengadilan dengan melakukan:
 - a. Mengidentifikasi faktor-faktor dan risiko korupsi di lingkungan pengadilan;
 - b. Mengevaluasi peringkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadi (probabilitas) dan dampak jika risiko terjadi; serta pengendalian risiko yang ada saat ini.
2. Melakukan evaluasi atas penerapan Pasal 11 ayat (1) UNCAC.
3. Menyusun rencana untuk merespon pengendalian atau peluang risiko korupsi pengadilan berdasarkan hasil penilaian risiko korupsi (CRA) dan evaluasi penerapan Pasal 11 ayat (1) UNCAC.

Manfaat Kegiatan ini adalah untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembaruan Lembaga Peradilan dan mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Peradilan.

Manfaat bagi Badan Peradilan, antara lain :

- a. Hasil dari CRA dan evaluasi Pasal 11 UNCAC dapat digunakan sebagai rujukan untuk terus membangun dan menerapkan Sistem Manajemen Peradilan yang profesional, berbasis risiko sehingga semakin mampu memitigasi potensi terjadinya risiko korupsi, terhindar dari konsekuensi yang dapat terjadi dari korupsi;
- b. Badan peradilan di luar kegiatan ini dapat menggunakan perangkat CRA sebagai self-assessment (penilaian mandiri) pemetaan risiko dan identifikasi upaya mitigasinya;
- c. Memudahkan aparatur peradilan untuk bekerja dengan integritas dan profesional yang sangat baik;
- d. Meningkatnya kepedulian dan etos kerja terhadap penerapan manajemen organisasi berbasis risiko, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Manfaat bagi Mahkamah Agung, antara lain :

- a. Menggunakan CRA dan hasil dari evaluasi Pasal 11 UNCAC untuk meningkatkan kualitas Badan Peradilan di bawah naungannya; baseline dan monitoring serta evaluasi berbasis risiko;
- b. CRA dapat digunakan sebagai basis penerapan dari Pedoman Manajemen Risiko Mahkamah Agung;
- c. Mahkamah Agung memiliki perangkat yang dapat disosialisasikan kepada badan peradilan untuk melakukan self-assessment berbasis risiko terjadinya korupsi.

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama *Corruption Risk Assessment* (CRA) dengan KPK dan AIPJ : Kegiatan ini akan dilakukan pada Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di 9 (sembilan) kota berdasarkan demografis keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur. Adapun daftar pengadilan yang akan dilakukan penilaian CRA dan Pasal 11 ayat (1) UNCAC adalah sebagai berikut dibawah ini:

No	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara
1	PN Jakarta Barat	PA Jakarta Timur	PTUN Jakarta
2	PN Sidoarjo	PA Sidoarjo	PTUN Surabaya
3	PN Medan	PA Medan	PTUN Medan
4	PN Banjarmasin	PA Banjarmasin	PTUN Banjarmasin
5	PN Mataram	PA Mataram	PTUN Mataram
6	PN Balikpapan	PA Balikpapan	PTUN Samarinda
7	PN Manado	PA Manado	PTUN Manado
8	PN Kupang	PA Kupang	PTUN Kupang
9	PN Ambon	PA Ambon	PTUN Ambon

B. PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

1. PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2020 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.569 pengaduan, dengan rincian :

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2020

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.259
2	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	286
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.023
4	Pengaduan dari Satgas	1
Jumlah		3.569

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2020

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1	Masih Proses Penyelesaian		1.432
2	Selesai diproses		2.137
	a. Diperiksa Tim Bawas	131	
	b. Delegasi ke Tingkat Banding	1	
	c. Konfirmasi	62	
	d. Klarifikasi	685	
	e. Memorandum / Delegasi Internal	20	
	f. Dijawab Surat	853	
	g. Diarsipkan	17	
	h. Gabung berkas	349	
	i. Dicabut	19	
Jumlah		2.137	3.569

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- 2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- 3) Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.

- 2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak *fair*), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- 3) Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- 4) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- 6) Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- 7) Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- 8) Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- 9) Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- 1) Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan, disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum.
- 2) Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang.
- 3) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

2. SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 1 (satu) orang Hakim:

Nama : I S., S.Ag., M.H,

Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Agama Pct (dahulu Wakil Ketua Pengadilan Agama Tl)

Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Mks.

3. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 162 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2020

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	9	20	61	90
	Hakim Ad Hoc	-	-	7	7
2	Panitera	3	1	-	4
3	Sekretaris	2	1	2	5
4	Panitera Muda	2	-	4	6
5	Panitera Pengganti	3	2	15	20
6	Jurusita	2	1	5	8
7	Jurusita Pengganti	-	-	5	5
8	Pejabat Struktural	-	1	3	4
9	Staf	8	1	2	11
10	PPNPN	2	-	-	2
Jumlah		31	27	104	162

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan, sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel berikut:

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	81
2.	Panitera	7
3.	Sekretaris	2
4.	Panitera Muda	3
5.	Panitera Pengganti	7
6.	Jurusita	2
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	3
9.	Staf	-
10.	Calon Hakim	1
11.	Honoror	2
TOTAL		110

4. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2020 penguatan sistem pengawasan dilakukan *Consulting* dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 12 sd. 14 Februari 2020. Maksud dan Tujuan kegiatan *Consulting* tersebut :

- 1) Memberikan pemahaman teori dan praktek pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dari sisi kebijakan, resiko dan aspek pengendalian yang wajib dipersiapkan peserta dari satuan kerja.
- 2) Memberikan sarana knowledge managemen yang berkelanjutan, mengurangi hal tak terduga yang kurang menyenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui penerapan manajemen risiko.
- 3) Menginisiasi keberanian dari masing-masing satuan kerja untuk memulai transparan, akuntabel dan berintegitas sejak awal proses pengadaan untuk menghindari resiko pengadaan gagal selesai pada tahun anggaran berjalan maupun resiko tindak pidana.

Peserta kegiatan *consulting* terdiri dari Ketua Pengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen dari Pengadilan Baru yang memiliki proyek belanja modal gedung dan bangunan.

5. KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

a. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja, seperti tabel berikut:

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	6	7	5	25
Peradilan Agama	6	5	8	6	25
Peradilan Militer	1	-	-	-	1
Peradilan TUN	-	-	1	-	1
<i>Total</i>	14	11	16	11	52

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2020

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	88	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2	Administrasi Persidangan	139	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dll
3	Administrasi Perkara	148	Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
4	Administrasi Umum	299	Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll.
5	Kinerja Pelayanan Publik	97	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Perwakilan melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu bersama atas penanganan perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu:

Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Negeri Banda Aceh	2.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3.	Pengadilan Negeri Denpasar	4.	Pengadilan Negeri Tabanan
5.	Pengadilan Negeri Praya	6.	Pengadilan Negeri Mataram
7.	PTUN Kupang	8.	Pengadilan Militer III-15 Kupang
9.	Pengadilan Negeri Ambon	10.	PTUN Ambon
11.	PTUN Jayapura	12.	Pengadilan Agama Jayapura
13.	Pengadilan Negeri Manokwari	14.	Pengadilan Agama Manokwari
15.	Pengadilan Negeri Ternate	16.	Pengadilan Agama Ternate
17.	Pengadilan Agama Medan	18.	Pengadilan Negeri Binjai
19.	Pengadilan Negeri Padang	20.	Pengadilan Agama Padang
21.	PTUN Pekanbaru	22.	Pengadilan Agama Pekanbaru
23.	Pengadilan Agama Jambi	24.	PTUN Jambi
25.	Pengadilan Negeri Bengkulu	26.	Pengadilan Agama Bengkulu
27.	Pengadilan Negeri Palembang	28.	PTUN Palembang
29.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	30.	Pengadilan Agama Tanjung Karang
31.	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	32.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
33.	PTUN Bandung	34.	Pengadilan Negeri Bandung
35.	Pengadilan Agama Semarang	36.	Pengadilan Militer II-10 Semarang
37.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	38.	Pengadilan Negeri Bantul
39.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	40.	Pengadilan Militer III-12 Surabaya
41.	Pengadilan Negeri Batam	42.	Pengadilan Agama Batam
43.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	44.	PTUN Pangkalpinang
45.	PTUN Serang	46.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
47.	PTUN Pontianak	48.	Pengadilan Negeri Pontianak
49.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	50.	Pengadilan Agama Palangkaraya
51.	Pengadilan Agama Banjarbaru	52.	PTUN Banjarmasin
53.	Pengadilan Agama Samarinda	54.	PTUN Samarinda
55.	Pengadilan Negeri Manado	56.	PTUN Manado

57.	Pengadilan Negeri Palu	58.	PTUN Palu
59.	Pengadilan Negeri Kendari	60.	PTUN Kendari
61.	Pengadilan Militer III-16 Makassar	62.	Pengadilan Agama Makassar
63.	Pengadilan Negeri Gorontalo	64.	Pengadilan Agama Gorontalo
65.	Pengadilan Negeri Mamuju	66.	Pengadilan Agama Mamuju
67.	Pengadilan Negeri Tarakan	68.	Pengadilan Agama Tarakan

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu bersama:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:

1. Penanganan Perkara Perdata.
2. Penanganan Perkara Pidana.
3. Penanganan Perkara TUN.
4. Pengadilan Pajak

6. SATUAN TUGAS KHUSUS PENGAWASAN

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor: 37/BP/SK/VII/2020 tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan untuk dicatat agenda nomornya dengan diberikan kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 1 (satu) berkas pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II.

7. PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2020 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	11	9	7	5	32
Peradilan Agama	5	8	7	4	24
Peradilan TUN	-	-	-	-	-
Peradilan Militer	-	-	1	-	1
Total	16	17	15	9	57

Catatan:

Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

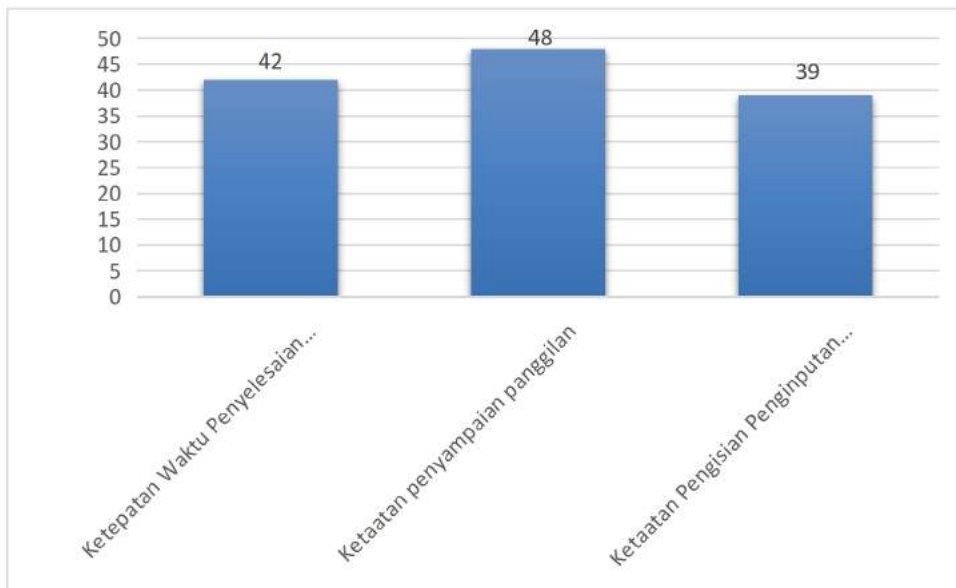
Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Hasil temuan pemeriksaan audit kinerja bidang penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2020, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

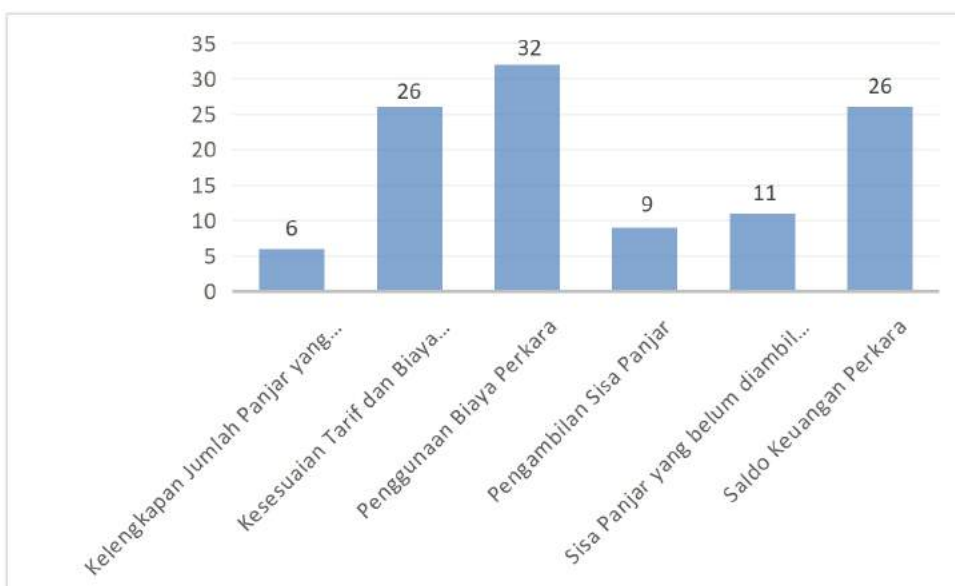


Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2020

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketaatan penyampaian panggilan lebih dominan yakni mencapai 48 (empat puluh delapan) temuan (37,21%) dari 129 (seratus dua puluh sembilan) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketaatan penyampaian panggilan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2020, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



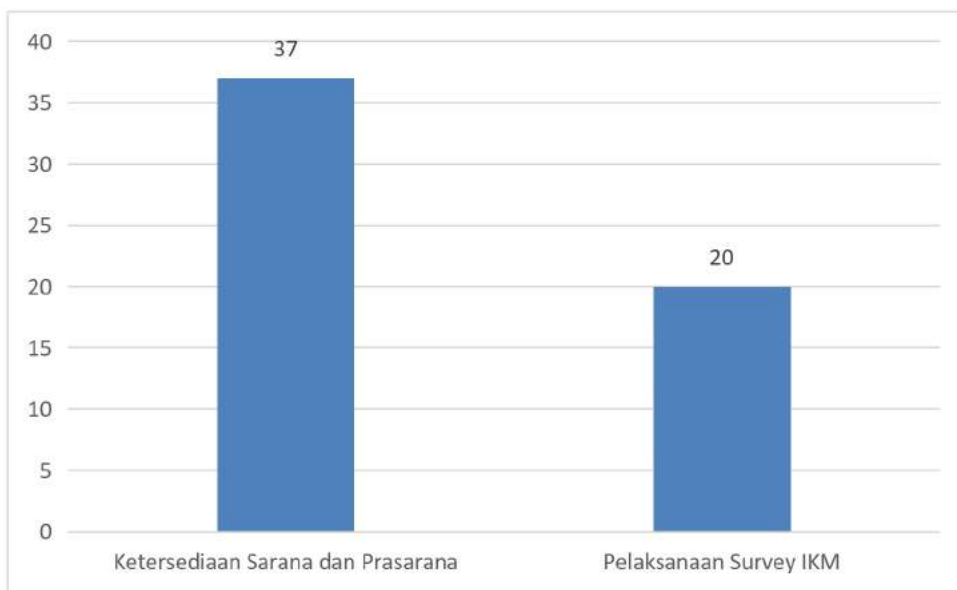
Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2020

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penggunaan biaya perkara lebih

dominan yakni mencapai 32 (tiga puluh dua) temuan (29,09%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penggunaan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2020, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2020

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang sarana prasarana dan pengukuran kualitas pelayanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan sarana dan prasana mencapai 37 (tiga puluh tujuh) temuan (64,91%) dari 57 (lima puluh tujuh) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.

8. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk:

1. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
2. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
3. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2018	2019
1	>90 – 100	AA	-	-
2	>80 – 90	A	7	9
3	>70 – 80	BB	52	57
4	>60 – 70	B	14	7
5	>50 – 60	CC	1	-
6	>30 – 50	C	-	1
7	0 – 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2019 terhadap 74 satuan kerja yang terdiri dari eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) dan BB (sangat baik), hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

9. PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Pada tahun 2020 Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah melakukan penilaian terhadap 560 (lima ratus enam puluh) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM dan 490 (empat ratus sembilan puluh) yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Internal merekomendasikan sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) unit kerja, yang terdiri dari 409 (empat ratus sembilan) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 69 (enam puluh sembilan) diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

1. Satuan Kerja yang diajukan memperoleh predikat WBK sejumlah 409 (empat ratus sembilan) satuan kerja

Tabel Satuan Kerja Yang Diajukan Kembali Memperoleh Predikat WBK

156 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Umum			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	2	Pengadilan Tinggi Kendari
3	Pengadilan Tinggi Samarinda	4	Pengadilan Tinggi Manado
5	Pengadilan Tinggi Palembang	6	Pengadilan Tinggi Bengkulu
7	Pengadilan Tinggi Jambi	8	Pengadilan Tinggi Jayapura
9	Pengadilan Tinggi Surabaya	10	Pengadilan Tinggi Palu
11	Pengadilan Tinggi Pontianak	12	Pengadilan Tinggi Mataram
13	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	14	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
15	Pengadilan Tinggi Kupang	16	Pengadilan Tinggi Banten
17	Pengadilan Tinggi Makassar	18	Pengadilan Negeri Sibolga
19	Pengadilan Negeri Bale Bandung	20	Pengadilan Negeri Tulungagung
21	Pengadilan Negeri Rote Ndao	22	Pengadilan Negeri Negara
23	Pengadilan Negeri Tilamuta	24	Pengadilan Negeri Watansoppeng
25	Pengadilan Negeri Amuntai	26	Pengadilan Negeri Bitung
27	Pengadilan Negeri Maros	28	Pengadilan Negeri Bengkulu
29	Pengadilan Negeri Balikpapan	30	Pengadilan Negeri Lhokseumawe
31	Pengadilan Negeri Bengkayang	32	Pengadilan Negeri Tais
33	Pengadilan Negeri Larantuka	34	Pengadilan Negeri Pare-Pare
35	Pengadilan Negeri Sengeti	36	Pengadilan Negeri Malang
37	Pengadilan Negeri Metro	38	Pengadilan Negeri Pandeglang
39	Pengadilan Negeri Langsa	40	Pengadilan Negeri Purwakarta
41	Pengadilan Negeri Palu	42	Pengadilan Negeri Padang
43	Pengadilan Negeri Amurang	44	Pengadilan Negeri Bajawa
45	Pengadilan Negeri Purworejo	46	Pengadilan Negeri Sidrap
47	Pengadilan Negeri Bangkinang	48	Pengadilan Negeri Ternate
49	Pengadilan Negeri Kandungan	50	Pengadilan Negeri Pelaihari
51	Pengadilan Negeri Stabat	52	Pengadilan Negeri Singkawang
53	Pengadilan Negeri Tabanan	54	Pengadilan Negeri Depok

55	Pengadilan Negeri Kendal	56	Pengadilan Negeri Barabai
57	Pengadilan Negeri Marisa	58	Pengadilan Negeri Kepanjen
59	Pengadilan Negeri Kota Agung	60	Pengadilan Negeri Banyuwangi
61	Pengadilan Negeri Tarakan	62	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
63	Pengadilan Negeri Poso	64	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
65	Pengadilan Negeri Pontianak	66	Pengadilan Negeri Klaten
67	Pengadilan Negeri Prabumulih	68	Pengadilan Negeri Bojonegoro
69	Pengadilan Negeri Sekayu	70	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
71	Pengadilan Negeri Palembang	72	Pengadilan Negeri Purwokerto
73	Pengadilan Negeri Bantul	74	Pengadilan Negeri Kotamobagu
75	Pengadilan Negeri Unaaha	76	Pengadilan Negeri Tondano
77	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	78	Pengadilan Negeri Kefamenanu
79	Pengadilan Negeri Kendari	80	Pengadilan Negeri Pasuruan
81	Pengadilan Negeri Merauke	82	Pengadilan Negeri Raha
83	Pengadilan Negeri Banjarnegara	84	Pengadilan Negeri Demak
85	Pengadilan Negeri Sidoarjo	86	Pengadilan Negeri Labuha
87	Pengadilan Negeri Palangkaraya	88	Pengadilan Negeri Luwuk
89	Pengadilan Negeri Situbondo	90	Pengadilan Negeri Samarinda
91	Pengadilan Negeri Arga Makmur	92	Pengadilan Negeri Calang
93	Pengadilan Negeri Biak	94	Pengadilan Negeri Jombang
95	Pengadilan Negeri Kayuagung	96	Pengadilan Negeri Bulukumba
97	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	98	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
99	Pengadilan Negeri Makassar	100	Pengadilan Negeri Karanganyar
101	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	102	Pengadilan Negeri Bintuhan
103	Pengadilan Negeri Saumlaki	104	Pengadilan Negeri Semarang
105	Pengadilan Negeri Tegal	106	Pengadilan Negeri Blora
107	Pengadilan Negeri Soasui	108	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
109	Pengadilan Negeri Mataram	110	Pengadilan Negeri Binjai
111	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	112	Pengadilan Negeri Kabanjahe
113	Pengadilan Negeri Raba/Bima	114	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
115	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	116	Pengadilan Negeri Denpasar

117	Pengadilan Negeri Masamba	118	Pengadilan Negeri Temanggung
119	Pengadilan Negeri Takengon	120	Pengadilan Negeri Sungai Liat
121	Pengadilan Negeri Bontang	122	Pengadilan Negeri Ambon
123	Pengadilan Negeri Magelang	124	Pengadilan Negeri Bukittinggi
125	Pengadilan Negeri Pelalawan	126	Pengadilan Negeri Semarang
127	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	128	Pengadilan Negeri Kolaka
129	Pengadilan Negeri Ranai	130	Pengadilan Negeri Sintang
131	Pengadilan Negeri Sorong	132	Pengadilan Negeri Praya
133	Pengadilan Negeri Pati	134	Pengadilan Negeri Bangil
135	Pengadilan Negeri Sinjai	136	Pengadilan Negeri Payakumbuh
137	Pengadilan Negeri Sambas	138	Pengadilan Negeri Curup
139	Pengadilan Negeri Mempawah	140	Pengadilan Negeri Kalianda
141	Pengadilan Negeri Gresik	142	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
143	Pengadilan Negeri Purwodadi	144	Pengadilan Negeri Kotabumi
145	Pengadilan Negeri Tobelo	146	Pengadilan Negeri Batam
147	Pengadilan Negeri Blangkejeren	148	Pengadilan Negeri Kuala Simpang
149	Pengadilan Negeri Manado	150	Pengadilan Negeri Selong
151	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	152	Pengadilan Negeri Cikarang
153	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	154	Pengadilan Negeri Wonosari
155	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	156	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

222 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh	2	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	4	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
5	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	6	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
7	Pengadilan Tinggi Agama Medan	8	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
9	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	10	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
11	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	12	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
13	Pengadilan Tinggi Agama	14	Pengadilan Tinggi Agama Kupang

	Bengkulu		
15	Pengadilan Tinggi Agama Palu	16	Pengadilan Tinggi Agama Padang
17	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	18	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
19	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	20	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
21	Pengadilan Tinggi Agama Banten	22	Pengadilan Tinggi Agama Manado
23	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	24	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
25	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	26	Mahkamah Syar'iyah Langsa
27	Mahkamah Syar'iyah Kutacane	28	Mahkamah Syar'iyah Jantho
29	Mahkamah Syar'iyah Sabang	30	Pengadilan Agama Ujung Tanjung
31	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	32	Pengadilan Agama Tanjung Pati
33	Pengadilan Agama Barabai	34	Pengadilan Agama Manado
35	Pengadilan Agama Tanjung	36	Pengadilan Agama Kayu Agung
37	Pengadilan Agama Tual	38	Pengadilan Agama Sintang
39	Pengadilan Agama Putussibau	40	Pengadilan Agama Tilmuta
41	Pengadilan Agama Bangil	42	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
43	Pengadilan Agama Unaaha	44	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
45	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	46	Pengadilan Agama Natuna
47	Pengadilan Agama Tuban	48	Pengadilan Agama Bangkinang
49	Pengadilan Agama Padang Panjang	50	Pengadilan Agama Solok
51	Pengadilan Agama Kraksaan	52	Pengadilan Agama Parigi
53	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	54	Pengadilan Agama Sinjai
55	Pengadilan Agama Pacitan	56	Pengadilan Agama Samarinda
57	Pengadilan Agama Sragen	58	Pengadilan Agama Soe
59	Pengadilan Agama Tarutung	60	Pengadilan Agama Bondowoso
61	Pengadilan Agama Panyabungan	62	Pengadilan Agama Gresik
63	Pengadilan Agama Sengeti	64	Pengadilan Agama Kendal
65	Pengadilan Agama Amuntai	66	Pengadilan Agama Muara Bulian
67	Pengadilan Agama Purwodadi	68	Pengadilan Agama Maninjau
69	Pengadilan Agama Stabat	70	Pengadilan Agama Tarakan

71	Pengadilan Agama Donggala	72	Pengadilan Agama Masohi
73	Pengadilan Agama Dabo Singkep	74	Pengadilan Agama Lubuk Basung
75	Pengadilan Agama Kota Banjar	76	Pengadilan Agama Purbalingga
77	Pengadilan Agama Curup	78	Pengadilan Agama Kupang
79	Pengadilan Agama Bogor	80	Pengadilan Agama Tembilahan
81	Pengadilan Agama Kisaran	82	Pengadilan Agama Bengkulu
83	Pengadilan Agama Bontang	84	Pengadilan Agama Demak
85	Pengadilan Agama Limboto	86	Pengadilan Agama Bima
87	Pengadilan Agama Baturaja	88	Pengadilan Agama Kota Madya Madiun
89	Pengadilan Agama Rantau	90	Pengadilan Agama Probolinggo
91	Pengadilan Agama Tanjung Balai	92	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
93	Pengadilan Agama Wonosari	94	Pengadilan Agama Karang Anyar
95	Pengadilan Agama Mungkid	96	Pengadilan Agama Depok
97	Pengadilan Agama Sanggau	98	Pengadilan Agama Bangkalan
99	Pengadilan Agama Bojonegoro	100	Pengadilan Agama Balikpapan
101	Pengadilan Agama Muara Bungo	102	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
103	Pengadilan Agama Pematang Siantar	104	Pengadilan Agama Marisa
105	Pengadilan Agama Tondano	106	Pengadilan Agama Muna-Raha
107	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	108	Pengadilan Agama Cikarang
109	Pengadilan Agama Poso	110	Pengadilan Agama Sawah Lunto
111	Pengadilan Agama Palopo	112	Pengadilan Agama Muara Sabak
113	Pengadilan Agama Cianjur	114	Pengadilan Agama Rembang
115	Pengadilan Agama Jepara	116	Pengadilan Agama Boyolali
117	Pengadilan Agama Negara	118	Pengadilan Agama Manna
119	Pengadilan Agama Sukoharjo	120	Pengadilan Agama Kendari
121	Pengadilan Agama Bulukumba	122	Pengadilan Agama Kalianda
123	Pengadilan Agama Muara Tebo	124	Pengadilan Agama Kota Madya Malang
125	Pengadilan Agama Polewali	126	Pengadilan Agama Sarolangun
127	Pengadilan Agama Sampit	128	Pengadilan Agama Situbondo
129	Pengadilan Agama Kolaka	130	Pengadilan Agama Bengkulu

131	Pengadilan Agama Klungkung	132	Pengadilan Agama Magelang
133	Pengadilan Agama Wates	134	Pengadilan Agama Pemasang
135	Pengadilan Agama Nunukan	136	Pengadilan Agama Tulang Bawang
137	Pengadilan Agama Jakarta Utara	138	Pengadilan Agama Fak-Fak
139	Pengadilan Agama Banjarnegara	140	Pengadilan Agama Ketapang
141	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	142	Pengadilan Agama Singaraja
143	Pengadilan Agama Muara Enim	144	Pengadilan Agama Sidoarjo
145	Pengadilan Agama Merauke	146	Pengadilan Agama Blambangan Umpu
147	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	148	Pengadilan Agama Bengkulu
149	Pengadilan Agama Maros	150	Pengadilan Agama Morotai
151	Pengadilan Agama Negara	152	Pengadilan Agama Selat Panjang
153	Pengadilan Agama Kudus	154	Pengadilan Agama Badung
155	Pengadilan Agama Sengkang	156	Pengadilan Agama Praya
157	Pengadilan Agama Bau-Bau	158	Pengadilan Agama Pangkajene
159	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	160	Pengadilan Agama Tigaraksa
161	Pengadilan Agama Purwakarta	162	Pengadilan Agama Sidikalang
163	Pengadilan Agama Pati	164	Pengadilan Agama Pare-Pare
165	Pengadilan Agama Palangkaraya	166	Pengadilan Agama Magetan
167	Pengadilan Agama Yogyakarta	168	Pengadilan Agama Jakarta Barat
169	Pengadilan Agama Sangatta	170	Pengadilan Agama Sumenep
171	Pengadilan Agama Pontianak	172	Pengadilan Agama Kebumen
173	Pengadilan Agama Pelaihari	174	Pengadilan Agama Temanggung
175	Pengadilan Agama Kajen	176	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
177	Pengadilan Agama Batang	178	Pengadilan Agama Lahat
179	Pengadilan Agama Pangkal Pinang	180	Pengadilan Agama Lumajang
181	Pengadilan Agama Giri Menang	182	Pengadilan Agama Simalungun
183	Pengadilan Agama Ponorogo	184	Pengadilan Agama Muara Teweh
185	Pengadilan Agama Brebes	186	Pengadilan Agama Majalengka
187	Pengadilan Agama Palembang	188	Pengadilan Agama Jember
189	Pengadilan Agama Sentani	190	Pengadilan Agama Marabahan
191	Pengadilan Agama Watampone	192	Pengadilan Agama Klaten

193	Pengadilan Agama Wonogiri	194	Pengadilan Agama Pamekasan
195	Pengadilan Agama Kota Madya Palu	196	Pengadilan Agama Tanggamus
197	Pengadilan Agama Sumber	198	Pengadilan Agama Bitung
199	Pengadilan Agama Tenggarong	200	Pengadilan Agama Sungailiat
201	Pengadilan Agama Pariaman	202	Pengadilan Agama Buol
203	Pengadilan Agama Ternate	204	Pengadilan Agama Pekalongan
205	Pengadilan Agama Serang	206	Pengadilan Agama Pasuruan
207	Pengadilan Agama Kabanjahe	208	Pengadilan Agama Luwuk Banggai
209	Pengadilan Agama Karawang	210	Pengadilan Agama Tasikmalaya
211	Pengadilan Agama Ambon	212	Pengadilan Agama Bangli
213	Pengadilan Agama Ciamis	214	Pengadilan Agama Selayar
215	Pengadilan Agama Tegal	216	Pengadilan Agama Bantul
217	Pengadilan Agama Arga Makmur	218	Pengadilan Agama Padang
219	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	220	Pengadilan Agama Wonosobo
221	Pengadilan Agama Medan	222	Pengadilan Agama Banyuwangi

13 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Militer			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	2	Pengadilan Militer II-10 Semarang
3	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	4	Pengadilan Militer III-17 Manado
5	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	6	Pengadilan Militer II-09 Bandung
7	Pengadilan Militer III-15 Kupang	8	Pengadilan Militer III-18 Ambon
9	Pengadilan Militer I-02 Medan	10	Pengadilan Militer I-05 Pontianak
11	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	12	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
13	Pengadilan Militer I-04 Palembang		

18 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	4	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal

	Palu		Pinang
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	6	Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar
7	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	8	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
9	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	10	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	12	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
13	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	14	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
15	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	16	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
17	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	18	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

2. Satuan Kerja diusulkan memperoleh predikat WBBM sejumlah 69 (enam puluh sembilan) satuan kerja

Tabel Satuan Kerja Yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBBM

30 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Umum			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	2	Pengadilan Tinggi Bandung
3	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	4	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5	Pengadilan Tinggi Ambon	6	Pengadilan Tinggi Semarang
7	Pengadilan Negeri Gorontalo	8	Pengadilan Tinggi Denpasar
9	Pengadilan Negeri Oelamasi	10	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
11	Pengadilan Negeri Bandung	12	Pengadilan Tinggi Medan
13	Pengadilan Negeri Pekanbaru	14	Pengadilan Tinggi Jakarta
15	Pengadilan Negeri Muara Enim	16	Pengadilan Negeri Indramayu
17	Pengadilan Negeri Martapura	18	Pengadilan Negeri Mojokerto
19	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	20	Pengadilan Negeri Surakarta
21	Pengadilan Negeri Sampit	22	Pengadilan Negeri Surabaya
23	Pengadilan Negeri Bogor	24	Pengadilan Negeri Pangkalpinang

25	Pengadilan Negeri Bekasi	26	Pengadilan Negeri Wates
27	Pengadilan Negeri Tangerang	28	Pengadilan Negeri Yogyakarta
29	Pengadilan Negeri Kediri	30	Pengadilan Negeri Gianyar
28 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
3	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	4	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
5	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	6	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping
7	Pengadilan Agama Bekasi	8	Pengadilan Agama Pekanbaru
9	Pengadilan Agama Bandung	10	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
11	Pengadilan Agama Lamongan	12	Pengadilan Agama Gorontalo
13	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	14	Pengadilan Agama Sungguminasa
15	Pengadilan Agama Makassar	16	Pengadilan Agama Banjar Baru
17	Pengadilan Agama Banjarmasin	18	Pengadilan Agama Batam
19	Pengadilan Agama Semarang	20	Pengadilan Agama Mojokerto
21	Pengadilan Agama Jambi	22	Pengadilan Agama Martapura
23	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	24	Pengadilan Agama Tangerang
25	Pengadilan Agama Blitar	26	Pengadilan Agama Surabaya
27	Pengadilan Agama Jakarta Timur	28	Pengadilan Agama Indramayu

7 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Militer			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Militer Utama Jakarta	2	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	4	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
5	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	6	Pengadilan Militer II-08 Jakarta
7	Pengadilan Militer III-13 Madiun		

4 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta	2	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	4	Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta

10. PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwas.mahkamahagung.go.id.
2. Layanan pesan singkat / SMS / WhatsApp.
3. Surat elektronik (email).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat dan atau.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan MARI meliputi seluruh pengaduan baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama Tahun 2020 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI mengenai pungli di pengadilan sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) pengaduan.

Atas pengaduan tersebut, dilakukan penelaahan apakah pengaduan memenuhi syarat dan cukup bukti serta logis atau tidak. Apabila ada yang dirasakan masih kurang bukti, Badan Pengawasan MARI selaku pelaksana UPP MARI melakukan konfirmasi (permintaan tambahan bukti) kepada Pelapor, dan apabila berdasarkan hasil telaah dinyatakan telah cukup bukti, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan untuk melakukan penelusuran terhadap kebenaran pengaduan tersebut. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemantauan dan penyelidikan pada 2 (dua) satuan kerja pengadilan terhadap dugaan adanya pungli terhadap pelayanan publik yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wonosari.

Hasil dari pemantauan yang dilakukan Tim UPP diserahkan kepada Kepala Badan Pengawasan MARI selaku Ketua UPP MARI untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan MARI. Produk UPP ini merupakan dokumen dan data serta

bukti (*evidence*) tentang dugaan adanya pungutan liar yang diperoleh Tim UPP dan digunakan untuk bukti dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa, sebagai tindaklanjut dari temuan UPP.

11. INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan MARI menilai bahwa sidak salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja maupun perilaku Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Tahun 2020 telah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sejumlah 1 (satu) satuan kerja yaitu pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

12. PENYAMARAN (*Mystery Shopping*)

Mystery Shopping (MS) adalah sebuah tehnik yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan. Penilaian dan pengumpulan informasi ini dilakukan secara rahasia, sedangkan orang yang melakukan tugas rahasia tersebut dinamakan *Mystery Shopper*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengadopsi metode ini sebagai salah satu metode mengukur kualitas pelayanan di pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

Tahun 2020, telah dilakukan *Mystery Shopping pada Wilayah*, :

1. Jawa Tengah
2. Jogjakarta
3. Lampung
4. Gorontalo

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2020. Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2020. Menindaklanjuti hasil Reviu PIPK, sesuai Surat Keputusan Wakil Ketua

		Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/SK/IX/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, Tim Auditor Badan Pengawasan diperankan sebagai Pengendali Teknis dalam kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk lebih memperkuat Tim Penilai PIPK MA RI dalam melaksanakan penilaian Penerapan PIPK di lingkungan MA RI.
2	Reviu RKA K/L	<p>Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian). - Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat. - Alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume output riil aset (BMN) existing sebagai basis data pengusulan alokasi. <p>Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak diperoleh.</p>
3	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 98,87 % dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai mencapai 94,85% senilai Rp.1.981.642.607.005 b. Belanja Barang mencapai 96,74% senilai Rp.656.202.890.367 c. Belanja Modal mencapai 97,68% senilai Rp.317.979.226.236 <p>Terdapat dua Satuan Kerja yang tidak menandatangani kontrak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadilan Negeri Manokwari dikarenakan anggaran ditarik oleh pusat (Biro keuangan) sehingga tidak dapat dilaksanakan; b. Pengadilan Negeri Nanga Bulik, terdapat permasalahan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sehingga untuk pengadaan jasa konstruksi dan jada konsultasi pengawasan tidak dapat dilakukan penandatanganan kontrak. Namun untuk konsultasi perencanaan sudah terealisasi sebesar 85%. <p>Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 85,80 yakni Peringkat Kualitas Belanja Baik.</p>
4	Liaison Officer (LO)	Sampai dengan semester pertama tahun 2020 diperoleh informasi melalui <i>entry meeting</i> Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2019, menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku Penanggungjawab pemeriksa maka diperlukan <i>Liaison Officer</i> untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan <i>auditee</i> yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan

		Peradilan yang Berada Dibawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai <i>Liaison Officer</i> pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya untuk Mahkamah Agung RI
5	Reviu Revaluasi BMN	Meskipun pada tahun 2020 ini Badan Pengawasan MA RI tidak memiliki target kinerja Reviu Revaluasi BMN, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi. Secara umum hasil pelaksanaan reviu adalah: 1. Reviu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Reviu atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Probit Audit	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa. Probit Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Tahun 2020, probity audit dilaksanakan pada 24 (dua puluh empat) satuan kerja

D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil

rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2020 yang terdiri dari 569 temuan dengan 1.220 rekomendasi sebesar Rp35.922.673.759,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.083 rekomendasi sebesar Rp29.796.510.494,85.
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 122 rekomendasi sebesar Rp5.602.934.444,58.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp523.228.819,63.

E. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 masyarakat umum yang secara langsung menggunakan aplikasi siwas sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui SIWAS MA-RI Tahun 2020

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	841
2	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	142
3	Inisiatif Tingkat Banding	40
TOTAL		1.023

F. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2020

Pemeriksaan / Kegiatan (LHP)	Wilayah				Jumlah Capaian	Target
	I	II	III	IV		
Pemeriksaan Kasus	37	74	30	14	155	175
Pemeriksaan Reguler	14	11	16	11	52	55
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	30	31	35	17	113	116

Peningkatan Zona Integritas	30	36	35	17	118	117
Pemeriksaan Monitoring	25	27	20	13	85	88
Layanan Audit Internal	97	164	87	50	398	411
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25	28	21	11	85	88
Pelaksanaan Audit Internal	33	54	34	23	144	136
Pemeriksaan Audit Kinerja	16	17	15	9	57	61
Pemeriksaan Audit Khusus	37	74	30	14	155	175
Pemeriksaan Kepegawaian	3	2	3	3	11	4

Catatan: Dari capaian, Realisasi Anggaran (91,70%)

Pagu : Rp31.972.836.000,00

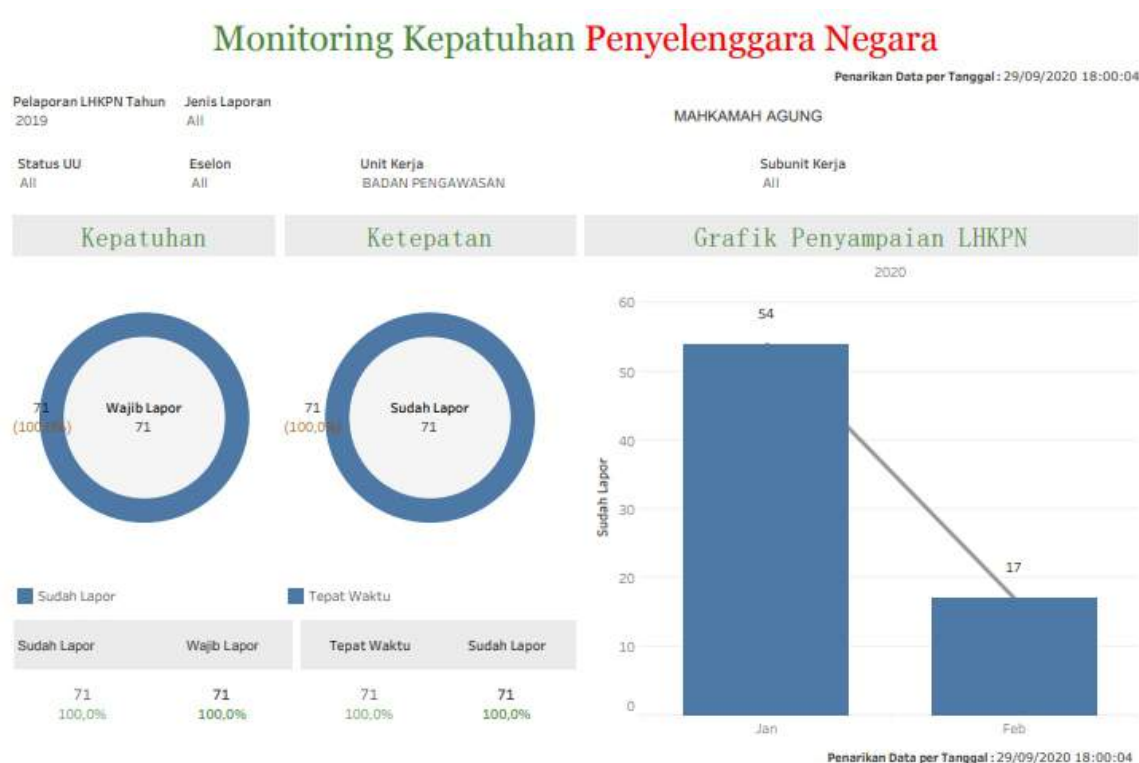
Realisasi : Rp29.319.660.823,00

Sisa : Rp2.653.175.177,00

G. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 2020 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 71 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 71 (100%).

Grafik Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2020



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan tahunan diatas bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2020, laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 dan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, atas hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengelolaan

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) orang, yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 71 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 83 orang dan tenaga honorer berjumlah 16 orang.

Pada tahun 2019, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 167 orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 62 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 89 orang dan tenaga honorer berjumlah 16 orang.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 dikelompokkan :

➤ 2099 unit peralatan dan mesin	Rp. 13.144.648.301
➤ 2.290 buah aset tetap lainnya	Rp. 535.403.685
➤ 12 unit aset tak berwujud	Rp. 3.254.333.180
Total pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 16.934.385.166

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2020 adalah 219 Unit dengan Total Rp 424.994.125 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).

c. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan jumlah PAGU (REVISI KE - 4 tanggal 12 Oktober 2020) sebesar Rp. 31.972.336.000,- terdiri dari:

BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2020 yaitu:

- **Pagu** : Rp. 5,760,000,000,-
(lima milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah)
- **Realisasi** : Rp. 5.566.060.514 (96,63)
(lima milyar lima lima ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu lima ratus empat belas rupiah)
- **Sisa** : Rp. 193.939.486,-
(seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2020 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.569 pengaduan, dengan rincian:

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2020

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.259
2	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	286
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.023
4	Pengaduan dari Satgas	1
Jumlah		3.569

3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 1 (satu) orang Hakim, atas nama I S., S.Ag., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Pct, dahulu Wakil Ketua Pengadilan Agama Tl) dengan penjatuhan Hukuman Disiplin berupa sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Mks.

4. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 162 aparat peradilan.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2020

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	9	20	61	90
	Hakim Ad Hoc	-	-	7	7
2	Panitera	3	1	-	4
3	Sekretaris	2	1	2	5

4	Panitera Muda	2	-	4	6
5	Panitera Pengganti	3	2	15	20
6	Jurusita	2	1	5	8
7	Jurusita Pengganti	-	-	5	5
8	Pejabat Struktural	-	1	3	4
9	Staf	8	1	2	11
10	PPNPN	2	-	-	2
Jumlah		31	27	104	162

5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan pada Tahun 2020 telah melakukan pemeriksaan reguler pada 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja. Pemeriksaan reguler pada lingkungan peradilan umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 Satker, peradilan agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 satker, peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker, dan peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

6. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2020, telah melakukan pemeriksaan monitoring tersebut pada 85 (delapan puluh lima) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Monitoring pada wilayah I berjumlah 25 satker, untuk wilayah II berjumlah 27 satker, untuk wilayah III berjumlah 20 satker, dan untuk wilayah IV berjumlah 13 satker.

7. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor: 37/BP/SK/VII/2020 tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan untuk dicatat agenda nomornya dengan diberikan kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 1 (satu) berkas pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II.

8. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2020 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja

Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) Satker sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	11	9	7	5	32
Peradilan Agama	5	8	7	4	24
Peradilan TUN	-	-	-	-	-
Peradilan Militer	-	-	1	-	1
Total	16	17	15	9	57

B. Rekomendasi

Badan Pengawasan telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik, selain itu Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maka perlu dilaksanakan dan ditingkatkan kegiatan rutin antara lain :

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)
2. Pemeriksaan Audit Kinerja
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)

Demikian Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Laporan ini terwujud atas kerja sama yang baik mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan.